



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENGATASI
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI
KOTA TANGERANG SELATAN**

Disusun Oleh :

TEGGAR ANUGRAH RAMADHAN

1 9 2 0 4 1 9 5 0

PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar Sarjana (S.IP)

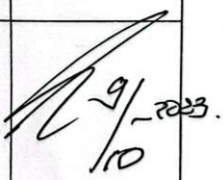
Program Studi Ilmu Pemerintahan

**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA**

2023

	KOREKSI PENGUJI	No Dokumen Tanggal Terbit Revisi	: /KP/A/STIP-AN : 8 Oktober 2023 : 1
---	------------------------	--	--

Nama	: Teggar Anugrah Ramadhan
NPM	: 192041950
Angkatan/Kelas	: XXIX/A1
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul	: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan
Tanggal Komprensif	: 5 Oktober 2023

NO	Pembimbing/Penguji	Saran Pembimbing/Penguji	Status Perbaikan	Paraf
1	Dr. Rajanner P. Simarmata M.Si	- Abstrak Perbaiki - Perbaiki penulisan padacover, Bab, daftar isi dan font sesuaikan ukurannya - 12, daftar pustaka - Oprasinoal konsep implmentasi dan kebijakan tidak usah di pisah. - Setiap lampiran diberi keterangan	Seluruh koreksi sudah diperbaiki	
2	Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si	- Perbaiki sesuai arahan penguji - tulisan yang sesuai buku pedoman - Keterangan isi dengan data yang ada	Seluruh koreksi sudah diperbaiki	
3	Catur Widiatmoko, SS, M.IP	- Judul di satukan Tangerang Selatan - STIPAN pengetikan gabung, perbaiki penulisan padacover, Bab, daftar isi dan font - Ketelitian dlm menulis - Selamat dan sukses	Seluruh koreksi sudah diperbaiki	

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan

Catur Widiatmoko, S.S., M.IP

Jakarta, 9 Oktober 2023
Pembimbing

Catur Widiatmoko, S.S., M.IP

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM MENGATASI
PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI
KOTA TANGERANG SELATAN**

TEGGAR ANUGRAH RAMADHAN

192041950

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar Sarjana (S.IP)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Diperiksa dan disetujui oleh:

Catur Widiatmoko, SS, M. IP

Pembimbing

Tanggal : 9/10/2023

Catur Widiatmoko, SS, M. IP

Ketua Program Studi

Tanggal : 9/10/2023

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintah Abdi Negara

Ketua

Dr. Sumarsono, MDM

Tanggal: 10-10-2023

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teggar Anugrah Ramadhan

NPM : 192041950

Program Studi ; Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah murni karya saya sendiri. Apabila saya mengutip karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenai sanksi pembatalan Skripsi ini sesuai ketentuan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi (STIP-AN) apabila melakukan tindakan plagiat (penjiplakan).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Teggar Anugrah Ramadhan

192041950

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI KOTA TANGERANG SELATAN

Oleh :

Teggar Anugrah Ramadhan, NPM : 192041950

Pembimbing :

Catur Widiatmoko, SS, M.IP

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisa menggunakan teori George C. Edward III yaitu analisa keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan dengan memperhatikan dimensi: 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur Birokrasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini di buat untuk mengetahui dan mendeskripsikan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah kota Tangerang Selatan. Dari hasil wawancara, ditemukan faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota Tangerang Selatan provinsi Banten. Faktor Pendukung :1.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pembentukan dan susunan perangkat daerah, 2.) Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial T.E.U,3.) Masyarakat.Faktor Penghambat :1.) Sumber daya manusia,2.) Komunikasi,3.) kurangnya sosialisai

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Implementasi Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangeragn selatan ini masih banyaknya keluhan dari masyarakat dan belum optimal dikarenakan masih terdapat keluhan yang dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci : Iplementasi,Kebijakan,Pengangguran dan Kemiskinan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,puji serta syukur selalu senantiasa kita sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya,tidak lupa shalawat seta salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW,dan para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman,sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI KOTA TANGERANG SELATAN”** Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintnahan Abdi Negara.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mengalami berbagai hal yang menjadi tantangan dan hambatan. Namun berkat adanya bantuan Do’a dan dorongan baik materi maupun motivasi dari kedua orang tua yang tak pernah putus, menjadikan penulis menjadi bersemangat dan termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan segala bukti penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu **Ayahanda Darmo Bando dan Ibunda Iis Nayanti.**

Selanjutnya sebagai rasa hormat dan kebanggaan sendiri, penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak **Catur Widiatmoko,SS,M.IP** selaku dosen pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran serta membagikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dalam hal bimbingan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan yang berbahagia ini,penulis juga akan menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. H. Muhammad Feisal Tamin,SSEP selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara.
2. Dr Sumarsono,MDM Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.

3. Dr Rajanner.P.Simarmata M.Si Selaku Direktur Akademik sekaligus dosen yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi kepada kami Angkatan XXIX A1/A2 untuk terus belajar dan mengejar impian.
4. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan serta seluruh Civitas Akademika di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara yang dengan segala keikhlasannya mengantarkan penulis pada saat yang tepat untuk menyelesaikan studi di STIPAN
5. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dan SKPD yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data serta membantu dalam memberikan dukungan serta mengarahkan peneliti dalam proses pengambilan data.
6. Kekasihku Kinanti Reski Nabila F yang terus memberikan motivasi serta menyumbangkan ide serta masukan kepada peneliti untuk memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kakak Nur Asdianti D. Macora yang telah memberikan ide dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Usulann Penelitan ini.
8. Sahabat sahabat saya Alfriza N. Prakosa, Farhan hilal, Muhammad Nurjulizar, Eki Kurniawan, Aldy C. Winata, Putri Lestari A, Chitra Ramdhani D. dan teman teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu.Terimakasih atas doa,semangat serta kebersamaan dalam keadaan susah maupun senang selama berada di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.
9. Rekan-rekan angkatan XXIX A1 dan A2 yang selalu bersama-sama untuk menuntut ilmu di kampus STIPAN.
10. Adik-Adik angkatan XXX,XXXI,dan XXXII yang telah mewarnai kehidupan kami di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.

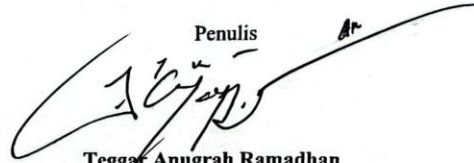
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan baik dari segi materi maupun penyampaian bahasa yang disajikan. Untuk hal itu penulis menyampaikan permintaan maaf atas segala kesalahan, kekurangan serta kekhilafan yang tidak di sengaja.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya dalam memberikan ide-ide untuk mengembangkan Ilmu Pemerintahan. Kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengembangkan sangat penulis harapkan guna memperoleh hasil yang lebih baik untuk kedepannya dan penyempurnaan Skripsi ini, baik dari penulisan sampai dengan isi serta pembahasannya.

Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga Allah SWT selalu memberikan Ridho untuk kita semua.

Jakarta, 11 September 2023

Penulis



Tegga Anugrah Ramadhan

192041950

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Dan Subfokus Penelitian.....	12
1.2.1 Fokus Peneitian.....	12
1.2.2 Subfokus Penelitian	13
1.3 Perumusan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Kegunaan Penelitian.....	14
1.5.1 Kegunaan Teoritis.....	14
1.5.2 Kegunaan Praktis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Kerangka Teoritis	16
2.1.1 Teori Umum Pemerintah Dan Pemerintahan.....	16

2.1.2 Teori Implementasi	25
2.1.3 Kebijakan	35
2.1.4 Pengangguran.....	39
2.1.5 Kemiskinan	42
2.2 Hasil Penelitian Yang Releven	46
2.3 Kerangka Pemikiran	50
2.4 Operasional Konsep.....	51
2.5 Hipotesis	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	55
3.1 Desain Penelitian	55
3.2 Lokasi Dan Jadwal Penelitian	56
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	56
3.2.2 Waktu Penelitian.....	57
3.3 Latar Penelitian.....	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data	58
3.4.1 Observasi	58
3.4.2 Wawancara.....	59
3.4.3 Mempelajari Berbagai Dokumen.....	60
3.4.4 Dokumentasi	61
3.5 Teknik Analisis Data	61
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
4.1.1 Sejarah Kota Tangerang Selatan.....	70

4.1.2 Letak Geografis.....	71
4.1.3 Kondisi Demografi Kota Tangerang Selatan.....	72
4.1.4 Kondisi Ekonomi Kota Tangerang Selatan	75
4.1.5 Kondisi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan	76
4.2 Hasil Penelitian.....	78
4.2.1 Pemerintah Daerah.....	78
4.2.2 Masyarakat.....	83
4.3 Pembahasan Temuan Penelitian	87
4.3.1 Komunikasi.....	87
4.3.2 Sumber Daya.....	89
4.3.3 Disposisi(Sikap Pelaksana).....	90
4.3.4 Struktur Birokrasi	91
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	92
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	86
RIWAYAT HIDUP.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Opreasional Konsep.....	66
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	72
Tabel 3.2 Daftar Informan.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	10
Gambar 1.2 Tingkat Penduduk Miskin.....	11
Gambar 2.1 Konsep Penta Helix.....	58
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	65
Gambar 3.1 Lokasi Penelitian.....	71
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber.....	81
Gambar 3.3 Triangulasi Teknik.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Observasi.....	90
Lampiran II Pedoman Wawancara.....	91
Lampiran III Catatan Lapangan Hasil Observasi.....	103
Lampiran IV Catatan Laporan Hasil Wawancara	104
Lampiran V Dokumen Pendukung(Foto dan Dokumen).....	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala aspek bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa di dalam kebulatannya,¹ oleh sebab itu pembangunan merupakan suatu cerminan bangsa yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

¹ Ginandjar Kartasasmita, ,Jakarta:1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta, hlm. 20.

Pemerintah mempunyai peran yang dominan dalam melaksanakan pembangunan yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut tidak akan berjalan lancar apabila sistem pemerintahan tidak ditenahi sedemikian rupa. Hal tersebut sangatlah penting untuk meraih kesuksesan dalam menjalankan pembangunan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memperbarui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan perubahan atas kekuasaan yang tidak lagi berpusat hanya di pemerintah pusat, tetapi terjadi perubahan atas hak dan wewenang dari pusat kepada daerah guna menjalankan dan mengatur urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI menurut asas otonomi daerah. Diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia, sehingga konsep pembangunan daerah harus tetap berada di dalam bingkai pembangunan nasional. Dengan demikian kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional itu sangat penting.

Otonomi Daerah merupakan suatu wujud nyata dari adanya semangat dalam menciptakan pemerintah daerah yang mandiri serta mampu memberikan peningkatan terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui Pemberian hak dan wewenang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk membantu pemerintah pusat

dalam mempercepat mewujudkannya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah baik dalam pelayanan, birokrasi, dan pemberdayaan yang baik. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan segala aspek yang masih kurang dalam daerah tersebut, serta meningkatkan daya saing di daerah dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki dan keanekaragaman daerah sehingga memberikan dampak yang baik untuk masyarakat daerah tersebut. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah itu sendiri yaitu sektor ekonomi. Dengan harus memperhatikan peluang-peluang setiap potensi yang dimiliki di daerahnya, sehingga daerah tersebut dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya..

Era globalisasi telah bergulir dominasi teknologi informasi sebagai infrastruktur menjadi sahabat para pelaku bisnis ekonomi akan lebih berbasis pada pengetahuan persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin tajam, sehingga SDM (Sumber Daya Manusia) dituntut untuk terus menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif, sehingga potensi insaninya berkembang maksimal. Dalam pelaksanaan sumber daya manusia SDM mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia (human resources) diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas dan partisipasinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan ini berarti semua warga negara Indonesia mempunyai

pekerjaan sesuai dengan kemampuannya sehingga diharapkan dapat memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak.

Namun disisi lain, ini berarti bahwa semakin besar jumlah orang yang mencari pekerjaan akan menimbulkan masalah ketenagakerjaan, khususnya permasalahan penyediaan lapangan pekerjaan yang belum memadai. Permasalahan mengenai kesempatan kerja ini menjadi semakin penting dan mendesak karena pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia. Dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang di butuhkan itu semakin sedikit sehingga menimbulkan pengangguran semakin banyak dan tingkat kemiskinan menjadi meningkat. Disaat peningkatan terhadap pengangguran terus mengalami lonjakan tentunya itu akan mengakibatkan angka kemiskinan terus meningkat. karna dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, wewenang pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program untuk memajukan daerahnya sangat besar. Pemerintah daerah lebih menguasai permasalahan yang dihadapi daerahnya dan juga potensi-potensi yang dimiliki untuk membiayai program-program tersebut. Salah satu wewenang yang diterima oleh pemerintah daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik. Diantaranya adalah wewenang untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Saat ini hampir semua provinsi di Indonesia menghadapi masalah klasik yang sudah lama terjadi, yaitu kemiskinan dan pengangguran.

Pengangguran dan kemiskinan merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Pengangguran terdiri dari orang-orang yang tidak bekerja namun masih aktif mencari kerja atau menunggu kesempatan bekerja kembali. Bekerja bukan sekedar mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan secara material semata, namun bekerja juga dapat mengantarkan seorang kepada kesuksesan dalam hidup dan kehidupan. Untuk itu sangat dibutuhkan upaya-upaya dalam mengatasi pengangguran tersebut yang setiap tahunnya semakin meningkat. Sedangkan Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan yaitu dari sudut pandang pengukuran, kemiskinan dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan absolut dan relatif. Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, sedangkan miskin secara relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Tingkat kemiskinan di Indonesia, sebenarnya sejak tahun 1998 sudah mengalami tren penurunan. Namun pada Maret 2022 angkanya masih berada pada kisaran 9,54

persen.² Berbeda dengan tingkat kemiskinan, Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2022 sebesar 5,83 persen.³ Tentunya Badan Pusat Statistik (BPS) mengakumulasi tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia tidak lepas akibat masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di daerah-daerah. Semakin banyak provinsi dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi maka tingkat kemiskinan dan pengangguran secara nasional juga akan tinggi. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia harus dilakukan mulai dari tingkat bawah. Artinya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran harus dimulai dari masing-masing daerah. Agar hal ini dapat berjalan efektif maka diperlukan peran signifikan dari masing-masing kepala daerah dan jajarannya.

Berdasarkan Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan mengungkapkan bahwa Kota Tangerang Selatan meraih Prestasi dan Penghargaan dengan total secara keseluruhan berjumlah 11 penghargaan. Antara lain :⁴

² Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen*, Oktober 1 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,juta%20orang%20terhadap%20Maret%202021>. Di akses pada Oktober 1 2022 pukul 19.37 WIB.

³ Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah perbulan*, Oktober 1 2022, [https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Februari,kerja%20yang%20terdampak%20COVID%20D19](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Februari,kerja%20yang%20terdampak%20COVID%20D19). Di akses pada Oktober 1 2022 pukul 19.51 WIB.

⁴ TangerangNews.com, *Tangerang Selatan Sabet 11 Penghargaan ini Daftarnya Raihannya*, April 14 2022, <https://tangerangnews.com/tangsel/read/40861/Kota-Tangerang-Selatan-Sabet-11-Penghargaan-Ini-Daftar-Raihannya>, Di akses pada Oktober 1 2022 pukul 22.30 WIB.

1. Penghargaan Quality Management System dari Transpacific Certifications Limited kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP)
2. Penghargaan atas kinerja (DISDUKCAPIL BISA) dari Menteri Dalam Negeri.
3. Penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik kategori "BAIK" dari KemenPANRB kepada DISDUKCAPIL.
4. Penyelenggaraan pelayanan publik kategori "Sangat Baik" tahun 2020 dari KemenPANRB kepada DISDUKCAPIL.
5. Penghargaan kategori daerah yang berkomitmen tinggi dalam pengelolaan inovasi administrasi negara (INAGARA AWARD) dari Lembaga Administrasi Negara LAN.
6. Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award.
7. Penghargaan Anugrah Parahitna Ekapraya APE kategori utama dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dari Kementerian K-PPPA kepada DPM3AKB.
8. Penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian Opini WTP dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Tangsel.
9. Penganugrahan Badan Publik, dalam Implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2018 .
10. Penghargaan Indonesia Award kategori Public Services Mall Initiative dari KIP Provinsi Banten.

Artinya Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang maju dilihat dari kepuasan publik terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pelayanan yang baik di tingkat Kota akan menentukan proses pembangunan di daerah tersebut seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Walaupun Kota Tangerang Selatan meraih predikat dan penghargaan yang baik dalam layanan publik namun tingkat penganggurannya dan kemiskinan masih cukup tinggi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Selatan memberikan Laporan Indikator Ekonomi Tahun 2021, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan pada Tahun 2021 sebesar 8,60 persen dan Tingkat Kemiskinan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,57 persen.⁵ Untuk lebih jelas gambaran Laporan Indikator Badan Perencanaan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan dapat dilihat dari gambar 1.1 dan 1.2, sebagai berikut :

⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Selatan, *Data Indikator Pembangunan Kota Tangerang Selatan*, 2021, <https://bappeda.tangerangselatankota.go.id/uploads/angka/11.pdf>, hlm 24 dan hal 47. Di akses pada Oktober 1 2022 pukul 23.00 WIB.

Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Gambar 3.13. Tingkat pengangguran terbuka Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

Sumber : BPS Data Indikator Pembangunan Kota Tangerang Selatan

Dengan memperhatikan Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang Selatan mengalami trend yang fluktuatif, terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 4.67 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan sebesar menjadi 4.78 persen. Namun saat pandemi di tahun 2020 meningkatkan secara signifikan TPT di Kota Tangerang Selatan sebesar 8,48 persen dan angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017. TPT 8,48 persen dapat diartikan bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat 8 orang penganggur. Pandemi Covid-19 membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan 77,41 persen dibandingkan tahun 2019 lalu. Peningkatan TPT terjadi lantaran terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja 2020. Meski terjadi kenaikan

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) namun sebetulnya terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja.⁶

Gambar 1.2 Tingkat Penduduk Miskin(P0)



Gambar 3.39 Persentase Penduduk Miskin (P0) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Data Indikator Pembangunan Kota Tangerang Selatan

Sedangkan pada gambar 1.2 Tingkat Penduduk Miskin (P0) Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Tangerang Selatan karena kehilangan pekerjaan.⁷

Pemerintah daerah merupakan pemeran utama dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Karena, pemerintah daerah yang merumuskan kebijakan dan program untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran

⁶ *Ibid hal.*, hlm 24.

⁷ *Ibid.*, hlm 47.

secara detail. mengadakan pelatihan agar dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan menyediakan infrastruktur dalam bentuk fisik dalam memperluas berbagai bentuk fasilitas.

Penelitian Martin Ravallion dan Monika Huppi (1991) tentang, *Measuring Changes in Poverty: A Methodological Case Study of Indonesia during an Adjustment Period*. (Journal: *The World Bank Economic Review*). Analisis pengaruh perubahan kebijakan pada masyarakat miskin sering terhambat oleh kesulitan yang melekat dalam mengukur kemiskinan dan membandingkan tingkat kemiskinan sebelum dan setelah perubahan kebijakan. Pendekatan diilustrasikan menggunakan data survei rumah tangga dari Indonesia sebelum dan sesudah guncangan eksternal dan program penyesuaian struktural berikutnya di pertengahan 1980-an. Studi ini menemukan bahwa kondisi awal pola pertumbuhan kemiskinan memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan momentum untuk pengentasan kemiskinan selama periode tersebut. Penelitian diatas lebih condong membahas program kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia pada era tahun 1980-an. Penelitian diatas belum secara fokus membahas proses implementasi kebijakan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia.

Adanya Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial T.E.U di Kota Tangerang Selatan menjadi pendukung ditengah upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan salah satu tanggungjawabnya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, dikarenakan perda tersebut membantu Pemerintah Kota

Tangerang Selatan dalam memetakan masyarakat miskin dan pengangguran sesuai dengan kebutuhan penduduknya.

dalam merumuskan suatu kebijakan dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan untuk melaksanakan suatu perencanaan dan pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Berdasarkan hal-hal tersebut, tujuan penelitiannya yaitu :

1. Mengidentifikasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kota Tangerang Selatan ; dan
2. Menampung aspirasi serta merumuskan strategi untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Tangerang Selatan.

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam menyangkut Pengangguran dan Kemiskinan dengan mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan”**

1.2 Fokus Dan Subfokus Penelitian

1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan”**

1.2.2 Subfokus Penelitian

Dilakukan secara fokus, sempurna dan mendalam maka penilitan ini akan merumuskannya kedalam sub fokus yaitu **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan** sebagai berikut :

1. Menjalankan tugasnya dengan mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang membahas dan menyepakati aturan Pemerintah Daerah
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat baik dari pengangguran dan masyarakat kurang mampu, dan;
3. Melakukan Pengawasan dan kolaborasi kinerja pemerintah daerah dengan instansi lainnya.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti dapat merumuskan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan ?
3. Upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan
2. Untuk mendiskripsikan dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan
3. Untuk mendiskripsikan upaya Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya pihak akademik yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan.
2. Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan.
3. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; (1) Pemerintah daerah; (2) otonomi daerah; (3) Konsep Kebijakan (4) Kesenjangan Ekonomi. Semoga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan pemerintah, Swasta, akademisi, organisasi dan Masyarakat serta media yang terlibat untuk mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan.
2. Dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah, swasta, komunitas, akademisi dan media dalam kepedulian terhadap Masyarakat dalam mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan.
3. Memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau dasar dalam memberikan peran dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan lebih lanjut guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini dilakukan, dalam hal ini untuk menciptakan masyarakat yang kreatif dan mandiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Umum Pemerintah Dan Pemerintahan

2.1.1.1 Pemerintah

Menurut Ermaya Suradinata menjelaskan Pemerintah diartikan sebagai organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu Negara, mencakup urusan masyarakat, urusan teritorial dan urusan kekuasaan dalam rangka pencapaian tujuan negara.⁸

Adapun pandangan lain menjelaskan tentang Pemerintah yang dikemukakan oleh Montesquieu bahwa pemerintah merupakan seluruh lembaga yang bisa dikenal dengan nama Trias Politika baik itu Legislatif (membuat perundang-undangan), Eksekutif (pelaksana perundang-undangan) dan Yudikatif (mengawasi pelaksanaan perundang-undangan)⁹

Menurut Talizduhu Ndraha mengartikan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan *civil* bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu bahkan warga negara asing

⁸ Ermaya Suradinata, *Manajemen Pemerintahan dalam Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT. Vidcodata, 2022), hlm 14.

⁹ Dharma Setyawana Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 35.

atau siapa saja yang ada pada suatu saat berada secara sah(legal) di wilayah Indonesia,berhak menerima layanan sipil tertentu dan Pemerintah wajib melayaninya.¹⁰

Pandangan lain tentang Pemerintah antara lain dikemukakan oleh Marbun & Mahfud terbagi atas dua pengertian yaitu :

- (a) Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan Negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang undang.dalam pengertian ini pemerintahan hanya berfungsi sebagai badan Eksekutif(Bestuur).
- (b) Pemerintahan dalam arti luas adalah semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan *legislative* dan yudikatif.¹¹

Dari beberapa teori yang ada di atas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa pemerintah merupakan suatu organisasi yang saling atau lembaga yang saling berkaitan dengan memiliki kekuasaan atau wewenang yang berfungsi untuk memberikan pelayanan publik dan mengatur masyarakat serta melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan guna mencapai tujuan Negara.

¹⁰ Taliziduhu Ndraha, *Kybernology 1* (Jakarta:Rineka Cipta,2011), hlm 6.

¹¹ SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty,2006), hlm 8.

2.1.1.2 Pemerintahan

Menurut Taliziduhu Ndraha bahwa Pemerintahan adalah sebuah sistemn multiproses yang bertujuan memenuhi dan melidungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan *civil*.¹²

Sementara teori lain menurut syafiie,Pemerintahan itu adalah kelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan,memimpin dan hubungan antara dirinya dengan masyarakat,antara departemen serta unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.¹³

Pendapat lain oleh Ermaya suradinata mengatakan bahwa pemerintahan adalah proses kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah.Pandangan tentang pemrintahan tersebut sangat luas,karena semua aktifitas kegiatan negara digerakan dalam rangka memberikan kesejahteraan dan rasa aman pada masyarakat.proses tersebut melibatkan lembaga militer,kepolisian,fungsi legislative,keuangan dan penegak hukum yang berkeadilan dalam rangka memberirkan pelayanan kepada masyarakat menumbuh kembangkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan bagi kepentingan bangsa.¹⁴

Dalam pandangan politik,labolo mengatakan bahwa pemerintahan dipahami sebagai bagian dari tiga cabang kekuasaan sebagaimana yang dikembangkan lewat Trias politika oleh montesquei.selain legislatif dan yudikatif,cabang eksekutif dianggap merupakan pengertian pemerintahan dalam arti sempit.Pengkhususan

¹² Taliziduhu Ndraha,*Kybemology 1*(Jakarta:Rineka Cipta,2011),hlm 5.

¹³ Inu Kencana Syafiie,*Etika Pemerintahan*(Jakarta: PT.Rineka Cipta,2011),hlm 18.

¹⁴ Ermaya Suradinata,*Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*(Jakarta: PT.Vitcodata,2022),hlm 14-15.

tersebut mengandung konsekuensi atas pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana proses pemerintahan dalam arti sempit tadi bekerja secara efektif di tengah tengah masyarakat. Persoalan ini telah merangsang sekelompok sarjana di bidang administrasi negara untuk menguraikan bagaimana konsep Pemerintahan sebagai suatu ilmu dapat bekerja melalui lembaga-lembaga yang ada selaku pelaksana setiap urusan politik¹⁵

Sedangkan Teori lain yang dikemukakan oleh Salam bahwa Pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Perundang-undangan Negara.¹⁶

2.1.1.3 Pemerintah Daerah

Pada Pasal 1 Ayat (2) No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu

¹⁵ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan, Sebuah Kajian Teori, Konsep, Dan Pengembangannya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 18-19.

¹⁶ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2007), hlm 37.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2), <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>, diakses pada Oktober 2, 2022

dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota, itu mempunyai pemerintah daerah yang di atur dalam undang-undang.¹⁸

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.¹⁹

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintah Negara yang terdiri atas: kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara, kepentingan umum, selain itu keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁰

Transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi pada saat era reformasi, tentunya merubah model sistem penyelenggaraan pemerintahan dari semua wewenang ada di pusat (sentralisasi) menjadi pembagian wewenang terhadap daerah masing-masing (desentralisasi). Mekanisme pembagian wewenang

¹⁸ *Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (1)*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2018), hlm 131.

¹⁹ *UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Pasal 1*, (Jakarta Selatan: PT Visimedia Pustaka, 2016), hlm 22.

²⁰ *Ibid*, hlm 58.

tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan mengalami pembaruan di dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004. Dalam pembaruan tersebut adanya pembagian wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan provinsi menyerahkan kepada pemerintah daerah yaitu kabupaten/kota yang bertujuan untuk meningkatkan demokrasi partisipatif dan efisiensi dalam mengatur urusan pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah spesifikasi urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan yaitu, urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum.

1. Urusan Pemerintah Absolut yaitu Urusan Pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan Pemerintah Konkuren yaitu, Urusan Pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat, dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Urusan Pemerintah Umum yaitu, Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Hal tersebut tentunya mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Masyarakat untuk Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan. Hal ini terdapat pada urusan Pemerintah Konkuren bagian wajib non pelayanan dasar.²¹

²¹ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2007), hlm 37.

2.1.1.4 Otonomi Daerah

Pengertian dari otonomi daerah secara harfiah adalah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “*otoni*” berasal dari kata “*autos*” yang berarti “sendiri” dan “*nomos*” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.²²

Menurut pakar Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Sementara itu Ateng Syarifudin mengatakan mengartikan otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian yang dimiliki daerah tetapi bukan kemerdekaan, melainkan hanya kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan.²³

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah

²² Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm.52.

²³ *Ibid.*, hlm 53.

yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.²⁴

2.1.1.5 Tujuan Otonomi Daerah

Adapun pengertian otonomi daerah yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Otonomi daerah bertujuan untuk mengembangkan daerah, serta isi di dalam daerah tersebut. Dengan adanya penerapan otonomi daerah, diharapkan juga dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Di Indonesia, otonomi daerah sudah diterapkan.

Adapun beberapa tujuan lainnya dari otonomi daerah, yaitu, Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat, Bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi, Bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat, Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan daerah, Bertujuan untuk

²⁴ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 74.

memelihara hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud adalah antara pusat dan daerah. Selain itu, menjalin hubungan baik antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat, Bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas. Serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari pihak DPRD

Indikator yang dapat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah meliputi empat faktor, antara lain:

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.²⁵ Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu member sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.²⁶

2. Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk

²⁵ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015, hlm. 46

²⁶ Veithzal rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.6

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Peralatan

Undang-undang nomor 38 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 di katakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.

4. Organisasi dan Manajerial

Organisasi dan Manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan.

2.1.2 Teori Implementasi

2.1.2.1 Pengertian Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada

prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan.²⁷

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.²⁸ Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat.²⁹

Menurut Grindle (dalam Winarno), implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang kebijakan bisa direalisasikan sebagai tujuan-tujuan memudahkan dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Mazmanian, Daniel A, dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, "pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin

²⁷ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan., *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.

²⁸ Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-lionis, 1986, hlm 15.

²⁹ Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.

diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya".³⁰

Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut: "cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bags diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedenganrannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien."³¹

Dari berbagai sudut pandang diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh berbagai macam sektor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung dengan berkolaborasi berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2.2 Teori Implementasi Menurut George C. Edward Iii

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan, Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana

³⁰ Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA, 1983, hlm 139.

³¹ *Ibid.* hlm 141.

actor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya di organisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Adapun teori implementasi kebijakan menurut pendapat George C. Edwards III yaitu :

“Policy Implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy—such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule—and the consequences of the policy for the people whom it affects.”³²

Berdasarkan pernyataan dari George C. Edwards III tentang implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasannya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari Tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhi.

Jadi implementasi itu merupakan Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

³² Edward III, George C., *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980, hlm 1.

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan diatas,maka George Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi,yaitu :³³

1. *Communication*/Komunikasi
2. *Resource*/Sumber daya
3. *Disposition*/disposisi
4. *Bureaucratic Structure*/Struktur birokrasi

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijelaskan oleh Edward III dalam buku *Implementiing Public Policy* dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas,Adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu :

1. ***Communication*** menurut Edward III adalah,

*“ The first requirement for effective policy implementation is the those who are implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decisions and implementation orders must be transmitted to appropriate personal before they can be followed.Naturally,these communications need to be accurate,and they must be accurately perceived by implementors.many obstacles lie in the path of transmission of implementation communication. ”*³⁴

Jadi berdasarkan pengertian George C. Edwards III,komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan.Pelaksanaan yang

³³ George C Edward III,*Implementing Public Policy*,Washington DC : Cpmgressional Quarterly Press,1980 hlm 10.

³⁴ George C Edward III,*Implementing Public Policy*,Washington DC : Cpmgressional Quarterly Press,1980 hlm 17.

efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

2. **Resources** dalam keberhasilan suatu Implementasi kebijakan menurut Edward III adalah,

“No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective. Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they intended; and facilities (including buildings, equipment, land and supplies) in which or with which to provide service will mean that laws will not be provided, and reasonable regulations will not developed.”³⁵

Menurut George C. Edward III bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C. Edward III sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan

³⁵ George C Edward III, *Implementing Public Policy*, Washington DC : Congressional Quarterly Press, 1980 hlm 53.

keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.

3. **Dispositions** dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah.

*“the dispositions or attitudes of implementation is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. if implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. one of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. another reason is the complexity of the policies themselves. the way in which implementors exercise their discretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies affecting their organizational and personal interests.”*³⁶

Menurut George C Edward III, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas

³⁶ George C Edward III, *Implementing Public Policy*, Washington DC : Congressional Quarterly Press, 1980 hlm 89.

atau ciri-ciri dari para actor pelaksana. keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (karakteristik agen pelaksana).

4. **Bureaucratic structure** keberhasilan suatu implementasi kebijakan menurut Edward III adalah

*"Policy implementors may know what to do and have sufficient desire and resources to do it, but they may still be hampered in implementation by the structures of the organizations in which they serve. two prominent characteristics of bureaucracies are standard operating procedures (SOPs) and fragmentation. the former develop as internal responses to the limited time and resources of implementors and the desire for uniformity in the operation of complex and widely dispersed organizations : they often remain in force due to bureaucratic inertia. "*³⁷

Menurut George C. Edward III, Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau teralisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik..

³⁷ George C Edward III, *Implementing Public Policy*, Washington DC : Congressional Quarterly Press, 1980 hlm 125.

2.1.2.3 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edwards III (dalam Agustiono),

the are for critical factories to policy implementation they are: "communication, resources, disposition, and bureauratic structure".³⁸

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan ini mencakup: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; 2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di suatu wilayah lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor; 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; 2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.³⁹

Dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan maka tantangan-tantangan tersebut harus dapat teratasi sedini mungkin. Pada suatu sisi lain bahwa untuk mencapai keberhasilannya ada banyak variabel yang mempengaruhi

³⁸ Agustiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses pada 15 september 2022, hlm 154.

³⁹ Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta, 2002, hlm 21.

implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah.

Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.⁴⁰

Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:⁴¹

- a) **Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.** Untuk hal ini, perubahan-perubahan incremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), seperti telah dikemukakan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 179.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 49.

sebelumnya perubahan inkremental yang didasarkan pada pembuatan keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial dan diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku pembuat kebijakan akan sangat besar.

- b) **Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan.** Implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi secara derastis. Kegagalan program-program sosial banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat terhadap struktur dan prosedur-prosedur administrative yang ada.

2.1.3 Kebijakan

2.1.3.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.⁴²

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.⁴³

Menurut Knoepfel dan kawan-kawan dalam buku Solichin Abdul Wahab berpendapat mengartikan kebijakan sebagai:

“a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in the emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one” (serangkaian keputusan atau tindakantindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik).

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 149.

⁴³ George A. Steiner dan John B. Miner, *Management Policy and Strategy*, Alih Bahasa Ticoalu dan Agus Dharma, *Kebijakan dan Strategi Manajemen*, edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm. 22

Versi formal yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam buku Solichin Abdul Wahab, agaknya lebih luas dan cukup rinci ketimbang pandangan di atas, karena lembaga dunia ini telah memberikan makna pada kebijakan sebagai berikut:

“Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana”⁴⁴

Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan tersebut, maka penulis memahami arti dari kebijakan sebagai sebuah rangkaian rencana atau keputusan untuk kemudian dijadikan acuan tindakan yang dimanifestasikan dalam bentuk program-program terkait persoalan tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi kebijakan sangat penting perannya sebagai pemandu dalam menentukan arah tindakan yang harus dipatuhi dan dilakukan secara konsisten dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.3.2 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Menurut Suharno proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki

⁴⁴ Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit*, hlm. 9-10

tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidakdiharapkan (unintended risks).

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalah gunakan

2.1.4 Pengangguran

2.1.4.1 Pengertian Pengangguran

Pengertian kesenjangan menurut KBBI adalah perihal (yang bersifat, berciri) senjang, ketidakseimbangan, ketidak simetrisan, atau jurang pemisah,⁴⁵Kesenjangan dapat dibedakan menjadi :

1. Kesenjangan antar sektor, yaitu sektor industri dan sektor pertanian. Kesenjangan jenis ini merupakan masalah lama dan sudah menjadi bahan kajian para akar di banyak negara.
2. Kesenjangan antar daerah. Dalam sejarah, kesenjangan antar daerah terjadi antara wilayah Jawa dan Luar Jawa, dan sejak kemajuan Provinsi Bali yang luar biasa, menjadi kesenjangan “Jawa dengan Luar Jawa Bali”.
3. Kesenjangan antar golongan ekonomi. Kesenjangan jenis ini adalah yang paling berat dan dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis,

⁴⁵ KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, Diakses 21 Oktober 2022 pukul 23.35 WIB.

perekonomian yang tumbuh terlalu cepat justru mengakibatkan kesenjangan menjadi semakin parah.

2.1.4.2 Tingkat Pengangguran

Jumlah penduduk dalam suatu negara dapat dibedakan menjadi penduduk usia kerja (15-64 tahun), dan bukan usia kerja, yang termasuk kedalam kelompok bukan usia kerja (usia non produktif) yaitu usia 0-14 tahun dan manusia lanjut usia (manula) yang berusia ≥ 65 tahun. Dari jumlah penduduk usia kerja yang masuk angkatan kerja adalah mereka yang mencari kerja atau bekerja. Sebagian yang tidak bekerja (dengan berbagai alasan) tidak masuk angkatan kerja. Tidak semua angkatan kerja memperoleh lapangan pekerjaan, mereka inilah yang disebut pengangguran.⁴⁶

Tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak atau belum mendapat pekerjaan.⁴⁷ Dalam membicarakan mengenai pengangguran yang selalu diperhatikan bukanlah mengenai jumlah pengangguran, tetapi mengenai tingkat pengangguran yang dinyatakan sebagai persentase dari angkatan kerja. Membandingkan jumlah pengangguran diantara berbagai Negara tidak akan ada manfaatnya karena ia tidak akan memberikan gambaran yang tepat tentang perbandingan masalah yang berlaku.⁴⁸

⁴⁶ Prathama Raharja dan Mandala Manurung, Edisi Ke 3, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Indonesia, 2008) h.379.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Sudono Sukirno, *op.cit*, h.473.

Dari data-data tenaga kerja dapat diketahui dan di hitung berbagai konsep yang berkaitan dengan tingkat pengerjaan dan tingkat pengangguran. Konsep-konsep dimaksud adalah tingkat partisipanangkatan kerja (TPAK): tingkat pengerjaan (employment rate) dan tingkat pengangguran (unemployment rate). Angka- angka semacam ini berguna untuk mengenali situasi yang berlangsung di pasar tenaga kerja. pemahaman tentang situasi pasar kerja berguna bukan saja bagi perumusan kebijaksanaan tenaga kerja dan menciptakan kesempatan kerja.⁴⁹

2.1.4.3 Dampak Pengangguran

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai.

Ditinjau dari sudut pandang individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Disamping itu juga dapat mengganggu taraf kesehatan keluarga. Pengangguran yang berkepanjangan menimbulkan efek psikologi yang buruk bagi keluarganya. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Nyatalah

⁴⁹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta : Erlangga, 1996), h.79.

bawasanya masalah pengangguran adalah masalah yang sangat buruk efeknya kepada perekonomian dan masyarakat, oleh karenanya secara terus menerus usaha-usaha dilakukan untuk mengatasinya.⁵⁰

2.1.5 Kemiskinan

2.1.5.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang global, berarti kemiskinan menjadi suatu aspek penting bagi seluruh dunia. Berbagai Negara pastinya tidak terlepas dari kemiskinan dan kemiskinan itu sendiri adalah salah satu penyakit bagi dunia kemanusiaan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.⁵¹

Kemiskinan merupakan kondisi absolute dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tatanilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumberdaya alam maupun sumber manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh sebagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umumnya dapat dikenal dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang.⁵²

⁵⁰ Sudono Sukirno, *Ibid.h.* 13

⁵¹ 1Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 14

⁵² Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan*, (Malang : Intrans Publishing, 2013), hlm. 20

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Sujogyo, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada dibawah standart kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang buat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasar atas kebutuhan beras dan kebutuhan gizi. Kemiskinan adalah tidak tercapainya kebutuhan primer seperti kelaparan, sakit yang berkepanjangan karena ketiadaan biaya untuk pengobatan, tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap dan jadi pengemis. Menurut pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan menurut tadjuddin, yang membagi kemiskinan dari beberapa aspek dengan variasi yang berbeda, yaitu kemiskinan ekonomi, kemiskinan politik, dan kemiskinan sosial.⁵³

a. Kemiskinan Ekonomi

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang sumber daya yang dimaksudkan, bukan hanya membalas masalah finansial saja. Melainkan meliputi masalah kekayaan (wealth) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas maka

⁵³ Zubaedi, *ibid.*, hlm 104

kemiskinan yang diukur dari kekayaan secara lain dapat dengan standart baku yang dikenal dengan sebutan garis kemiskinan (poverty line) atau disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut.

b. Kemiskinan Politik

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat seseorang dengan kekuasaan (power). Kekuasaan yang dimaksud mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan seseorang dalam menjangkau dan menggunakan resources

c. Kemiskinan Sosial

Secara sosial kemiskinan menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan dalam meningkatkan produktifitas. Dari aspek-aspek diatas dapat diartikan bahwa kemiskinan disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat.

2.1.5.3 Karakteristik Masyarakat Miskin

Keadaan kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan. Pendapatan suatu rumah tangga dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu berusaha, bekerja, dan perolehan dari pemilikan aset. Rumah tangga miskin biasanya tidak atau sangat sedikit memiliki aset yang dapat mendatangkan penghasilan. Sumber pendapatan yang pertama, yaitu berusaha dengan skala sangat kecil-kecil atau bekerja sebagai buruh, kedua hal inilah yang paling mungkin untuk ditingkatkan, terutama bagi

mereka yang memang ingin bekerjadan berusaha. Masyarakat miskin digolongkan menjadi dua yaitu fakir dan miskin. fakir adalah golongan masyarakat yang sangat miskin dan sulit keluar dari kemiskinan karena tidak memiliki kemampuan yang memadai. Sedangkan miskin adalah golongan masyarakat yang hidup dibawah rata-rata kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan penghasilannya.⁵⁴

Kemiskinan membuat manusia menderita dan terhambat mengembangkan kemanusiaannya. Penderitaan ini nyata dalam realitas merebaknya kasus-kasus seperti penyakit busung lapar, kekurangan gizi dan penyakit lainnya dibeberapa daerah indonesia menurut meneth kelompok yang memiliki ketidak mampuan mengakibatkan masyarakat yang tergolong miskin berperilaku dan berpola hidup miskin, yang pada dasarnya tidak menikmati kemerdekaan untuk berusaha meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi.⁵⁵

⁵⁴ Muhtadi Ridwan, *Ibid.*, hlm. 4

⁵⁵ Meneth, *Pengembangan Masyarakat Desa*, (Penerbit USU Prees: Medan, 2005), hlm. 45

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Setelah membaca literasi di perpustakaan Nasional,google,jurnal-jurnal dan skripsi di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintah Abdi Negara,belum di temui hasil penelitian tentang Implementasi Model Penta Helix dalam mengambil Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.Namun,berbagai makalah,jurnal,skripsi dan diskusi tentang Peran Pemerintah daerah Dalam Mengatatasi Pengangguran ataupun Peran Pemerintah daerah Dalam Mengatasi Pengangguran sudah ada sejak lama dilakukan oleh berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi.Misalnya tulisan :

1. Supriadi Pada Tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar menulis skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KHILAN DI KOTA PALOPO”** Dimana dalam skripsi ini menyimpulkan Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Khilan dapat dikategorisasi secara umum menjadi dua peran yaitu 1. penumbuhan iklim usaha dan penguatan potensi atau daya usaha. Penumbuhan iklim usaha meliputi pendanaan, bantuan sarana & prasarana kepada pelaku Khilan, penyebaran informasi usaha, kemudahan dalam perizinan usaha, serta bantuan promosi dagang. Penguatan Potensi atau Daya berupa pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah Kota Palopo meskipun belum sepenuhnya maksimal.2. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Khilan di Kota Palopo

meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor penghambat kurangnya inovasi dalam pemasaran dan terbatasnya anggaran yang hanya sekian persen, Sedangkan faktor pendukung subur daya manusia dan sumber daya alam.⁵⁶

2. Rahmi Pada Tahun 2018 Fakultas Ushuluddin, Filsafat & Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar menulis skripsi dengan judul **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INDUSTRI BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN BANTAENG”** Dimana dalam skripsi ini menyimpulkan Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan, bahwa : 1. Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif sektor kuliner ada 3 yaitu Tataan regulasi, pengarahan strategi, dan Pelatihan. Pemberdayaan melalui upaya yang ditempuh oleh pemerintah itu sudah terlaksana dengan baik, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Faktor pendorong pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif sektor kuliner adalah Dukungan Multipihak baik dari Pemerintah (PMD,Koperasi,RKB), Semangat dan respon positif dari masyarakat yang terbukti dengan keikutsertaan dan kehadiran masyarakat, proses pembuatan produk yang tergolong mudah sehingga mudah diterima oleh masyarakat. selain itu kerjasama dalam pemasaran juga menjadi pendorong proses pelaksanaan produksi yang membuat masyarakat tertarik. Faktor pendorong selanjutnya

⁵⁶ Supriadi,2017, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilaf Di Kota Palopo*, <https://core.ac.uk/download/pdf/89564485.pdf>, diakses pada oktober 11 2022 pukul 03.00 WIB.

adalah Keterlibatan Beberapa Lembaga seperti NGO Lokal (LSM), Pendamping Desa, Pemerintah Desa dan Pemasaran. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kualitas SDM yang masih rendah, belum profesional, dan Paradigma masyarakat yang konservatif masih takut untuk mencoba dan malas untuk mencari wawasan. Modal, Ketersediaan peralatan produksi, Kemampuan untuk memenuhi kualifikasi pasar terkait BPOM dan Halal dan Desain produk.⁵⁷

3. Sitti Hajra Pada Tahun 2022 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare menulis skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN KEMISKINAN: ANTARA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BACUKIKI KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM)”** Dimana dalam skripsi ini menyimpulkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perpektif Ekonomi Islam) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 1. Adapun wujud penanggulangan kemiskinan antara pemerintah dan masyarakat yaitu diantaranya Perbaikan Rumah, pemberian modal usaha, pemberian peralatan menjahit, pemberian alat pertukangan, pemberian alat memasak, dan pemberian alat salon/tata rias. 2. Ada dua faktor yang mempengaruhi penanggulangan

⁵⁷ Rahmi, 2018, *peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif di kabupaten bantaeng*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12664/1/Peran%20pemerintah%20daerah%20dalam%20pemberdayaan%20masyarakat%20industri%20berbasis%20ekonomi%20kreatif.pdf> , diakses pada oktober 11 2022 pukul 03.05 WIB.

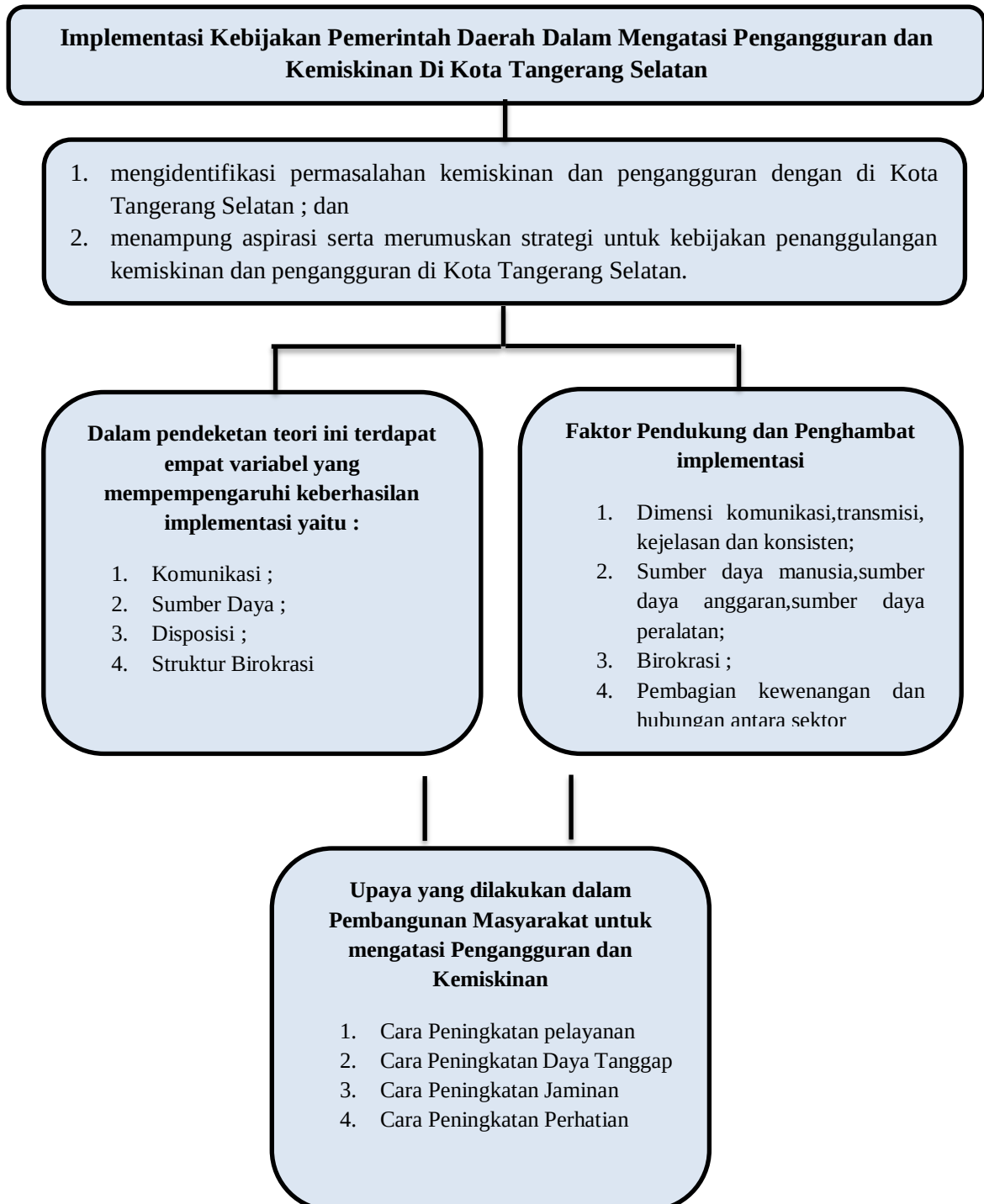
kemiskinan, yaitu faktor internal datang dari dalam pemerintahan untuk mengatasi kemiskinan dengan melakukan pelatihan-pelatihan sebelum menerima alat bantuan Sedangkan eksternal dijalankan oleh masyarakat dari luar pemerintahan yang dimana dilaksanakan oleh Yayasan LPK Buana Mandiri untuk melaksanakan pelatihan menjahit dan tata rias . 3. Implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Lompo'e sudah berjalan dengan baik. Adapun yang dilakukan Pemerintah dengan memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat, kemudian masyarakat memanfaatkan bantuan yang diberikan untuk mendapatkan penghasilan. Namun ada beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan tidak sesuai dengan keahliannya sehingga bantuan yang diberikan dijual . Adapun pengentasan kemiskinan dalam ekonomi Islam menurut Yusuf Qardhawi 61 bertumpu pada instrumen bekerja, pemberian zakat, dan jaminan negara dari beberapa sumber.⁵⁸

⁵⁸Sitti Hajra, 2022, *Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah Dan Masyarakat Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)*, <http://repository.iainpare.ac.id/3460/1/17.2400.100.pdf> , diakses pada oktober 11 2022 pukul 03.10 WIB.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil kajian teoritis yang telah di jelaskan, maka dirumuskan suatu alur penelitian yang merupakan kerangka pemikiran penelitian secara keseluruhan.

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



2.4 Operasional Konsep

Operasional konsep adalah cara untuk mendefinisikan sebuah konsep agar bisa diukur.⁵⁹ Operasional konsep diperlukan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis hal ini sangat perlu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian.

Agar lebih jelas dalam memahami peneliti membuat operasional konsep dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Operasional Konsep

KONSEP	VARIABEL	DEMENSI	INDIKATOR
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan	Implementasi	1. <i>Communication</i> /Komunikasi	• Dimensi • Transmisi • Kejelasan • Konsisten
		2. <i>Resources</i> /Sumber daya	• Sumber Daya Manusia • Sumber Daya Anggaran • Sumber Daya Peralatan

⁵⁹ *Operasional Konsep*, <https://kinibisa.com/artikel/detail/research/subdetail/research-writing/read/operasionalisasi-konsep-penelitian>, diakses pada Oktober 7 2022 pukul 13.26 WIB.

			• Sumber Daya Kewenangan
		3. <i>Disposition/ Disposisi</i>	• Pengangkatan Birokrasi • Intensif
		4. <i>Bureaucratic Structure/Sturuktur Birokrasi</i>	• Pembagian Wewenang • SOP (<i>Standart Operating Procedures</i>) • Fragmentasi
		1.mengidentifikasi permasalahan kemiskinan dan pengangguran	• Pemerintah Daerah dan SKPD
		2.menampung aspirasi serta merumuskan strategi untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Kota Tangerang Selatan.	• Masyarakat

2.5 HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan diatas berikut dapat diajukan Hipotesis Penelitian sebagai jawaban atas asumsi sementara terhadap masalah yang telah dirancang sebelumnya antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemerintah daerah khususnya untuk mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan sudah terimplementasikan namun belum optimal.
2. faktor pendukung dan penghambat Implementasi kebijakan pemerintah daerah khususnya untuk mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan lebih didominasi penghambat nya seperti sarana prasarana yang belum memadai secara menyeluruh baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan, pola komunikasi tidak berjalan dengan semestinya, tingkat Pendidikan yang masih rendah serta pengalaman yang belum memadai masyarakat nya itu sendiri, sikap acuh tak acuh untuk melakukan kolaborasi/Kerjasama antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas masyarakat dan Media.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah sendiri sudah dilakukan salah satunya mendirikan perusahaan daerah namun dalam perusahaan daerah ini kurang tepat sasaran karena berbasis investasi yang dimana hanya dapat dilakukan oleh kalangan masyarakat menengah ke atas.

Implementasi kebijakan pemerintah daerah ini sangat penting dilaksanakan dengan baik dan benar dikarenakan menjadi kewajiban untuk seluruh elemen masyarakat bukan hanya pemerintah saja namun juga pihak swasta, akademisi, komunitas masyarakat serta media untuk membangun masyarakat dengan kualitas yang memumpuni untuk mensejahterakan kehidupannya. maka dari itu peran dari pemerintah daerah kota Tangerang selatan juga sangat menentukan kualitas masyarakatnya, karena pada hakekatnya pemerintah daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat sekitar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁶⁰ Untuk itu, dalam rangka mendapatkan data lapangan peneliti harus terjun langsung ke lapangan agar dapat mengamati secara langsung keadaan masyarakat yang diteliti. Selanjutnya dalam kaitan penelitian ini berarti peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang peran pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota Tangerang Selatan.

Desain penelitian ini bersifat kualitatif yang memfokuskan pada sebuah peristiwa yang berangkat dari kesadaran dan pengalaman manusia. Pendekatan ini mengungkapkan makna dan konteks perilaku individu/kelompok dan proses yang terjadi dalam pola amatan dari faktor yang berhubungan. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa lisan, tulisan maupun dari sikap perilaku yang diamati.⁶¹

⁶⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 2001, hlm 630.

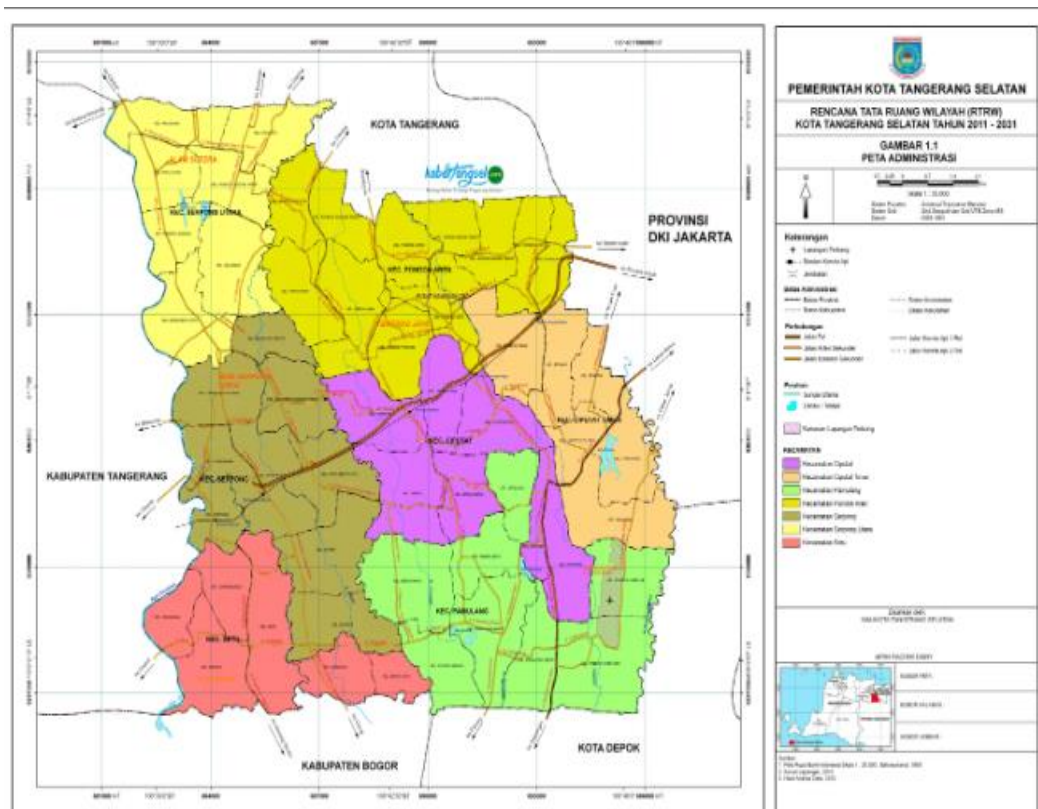
⁶¹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2000, hlm 4.

3.2 Lokasi Dan Jadwal Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Mengenal lokasi penelitian yang ingin diteliti penulis memutuskan untuk meneliti di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Sesuai dengan tempat penelitian tersebut, dapat dilihat peta daerah bedahan di bawah ini :⁶²

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian



Sumber : Kabar Tangsel.com

⁶² Kabar Tangsel.com, Peta Kota Tangsel, <https://kabartangsel.com/direktori-tangsel/peta-kota-tangerang-selatan>, diakses pada oktober 15 2022 pukul 3.16 WIB.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu bulan terhitung dari bulan September 2022 hingga bulan April 2023. Untuk Waktu dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023							
		10	11	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bimbingan Penyusunan Skripsi										
2	Observasi Lapangan Awal										
3	Penyusunan Usulan Penelitian										
4	Sidang Usulan Penelitian										
5	Perbaikan SUP										
6	Pengumpulan data										
7	Analisis Data										
8	Penyempurnaan Skripsi										
9	Sidang Komprehensif										
10	Perbaikan Skripsi										
11	Wisuda										

Sumber : Dialoh berdasarkan Kalender Akademik STIP-AN 2022/2023

3.3 Latar Penelitian

Latar penelitian ini adalah area dan situasi dimana pelaksanaan observasi, wawancara kepada informan dalam penelitian ini dilakukan di jam dan tempat yang telah disepakati terlebih dahulu dengan informan. Situasi dalam observasi dan wawancara ini dilakukan dengan susunan dan tanpa tekanan. Ini dimaksud agar informan mendapatkan informasi dengan luluasa tanpa merasakan adanya tekanan dan paksaan untuk memberikan informasi yang akurat dan dibutuhkan berdasarkan pengalaman. Dalam melakukan wawancara tidak lepas pula dilakukan pengamatan secara langsung terutama peran pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Kota Tangerang Selatan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan Teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya lengkap. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku

dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu.

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.

Maka melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan mana dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung. Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data mengenai proses Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Masyarakat Untuk Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap muka antara penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti mencatat semua jawaban dari responden sebagaimana adanya. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Maksudnya, dalam melakukan wawancara peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Adapun informan yang diminta informasinya mengenai penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Daftar Informan

No	Sektor	Informan	Jumlah
1.	Pemerintah	Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan,Ketua DPRD kota Tangerang Selatan,Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan	3 Orang
2.	Masyarakat	Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Kota Tangerang Selatan.	7 Orang
		TOTAL	10 Orang

3.4.3 Mempelajari Berbagai Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian keperpustakaan dan juga dokumen-dokumen yang ada di internet,yaitu dengan menganalisa bahan-bahan Pustaka yang berhubungan dengan penelitian khususnya yang berkaitan dengan Peran Pemerintaah Daerah Dalam Pembangunan Masyarakat Untuk Mengatasi Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan.

3.4.4 Dokumentasi

Peneliti juga melakukan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian melalui foto atau gambar yang bisa menjadi bukti fisik dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah untuk dibaca serta mudah diinterpretasi, bukan hanya memudahkan dalam menginterpretasi, tetapi juga dapat memberikan kejelasan setiap makna dari hasil fenomena yang diamati, Sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian.⁶³

Pengolahan data dimulai pada proses atau saat penelitian sedang berlangsung. Peneliti sebagai alat instrumen dan sekaligus alat pengumpulan data. Langkah awal pendekatan kualitatif, telah menyeleksi tentang apa yang ingin diketahui. Semua data bernilai sesuai dengan masalah yang diteliti, selanjutnya dibuat laporan penulisan. Selanjutnya secara garis besar menurut Muhajir, analisis data mengambil langkah sebagai berikut:⁶⁴

1. **Reduksi data.** Yaitu kegiatan penyusunan abstraksi data. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam. Data tersebut dibuat transkrip berupa abstraksi.

⁶³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasi hlm 97.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 29-33.

2. **Penyajian data.** Yaitu berupa sajian pokok-pokok atau garis besar data yang kesahihannya terjamin. Data disajikan pada pokok-pokok yang penting, kemudian dibuat pengelompokkan dan diberi tanda- tanda sesuai dengan kriteria-kriteria yang relevan dengan konteks kajian.
3. **Melakukan verifikasi.** Tahapan ini untuk menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data yang tersedia. Tahapan selanjutnya dilakukan pengujian data terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian. Pada tahap ini kategori yang dapat ditinjau kembali berdasarkan tinjauan literatur dan dicocokkan relevansinya. Selain melalui referensi ditinjau melalui ricek informandan para pakar sehingga peninjauan data dilakukan klarifikasi secermat mungkin.
4. **Kesimpulan disusun secara tentative.**Setelah kaitan antara katagori data terwujud,tahapan selanjutnya masuk ke dalam tahapan penjelasan.Dan dibuat kesimpulan berdasarkan data yang disajikan dengan utuh.Kesimpulan ini bersifat tentative,berfungsi sebagai bahan rujukan untuk kajian atau penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan.

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji *credibility* data (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (realibilitas) dan uji *confirmability* (obyektivitas).⁶⁵Diantaranya akan diuraikan sebagai berikut:

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 368-378.

1) Uji *credibility data* (validitas internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan member check.⁶⁶ Suatu data penelitian kualitatif dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam proses pengecekan keabsahan data pada penelitian harus melalui beberapa Teknik pengujian data. Adapun Teknik pengecekan *Credibility data* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan Pengamatan

Ketika peneliti melakukan perpanjangan pengamatan berarti penelitian kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.⁶⁷ Jadi, perpanjangan pengamatan ini secara langsung adanya perpanjangan keikutsertaan peneliti dengan informan dilapangan.

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan pada latar penelitian. Hal ini berarti penelitian dilakukan dilapangan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 368

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 369.

sampai keenuhan pengumpulan data tercapai.⁶⁸ Maksud per-panjangan pengamatan ini berlaku juga sebagai perpanjangan keikutsertaan dalam penelitian ini adalah usaha peneliti dalam melibatkan diri di dalam Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Setelah peneliti banyak memperoleh informasi tentang data yang diperlukan dalam kurun waktu penelitian maka peneliti akan menambah waktu keterlibatan penelitian dalam beberapa hari tertentu keseharian di Kota Tangerang Selatan sampai dinyatakan bahwa data yang telah diperoleh dirasa dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

b. Meningkatkan Ketekunan (Ketekunan Pengamatan).

Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan data dan informasi yang relevan dengan persoalan yang sedang dicari oleh peneliti, kemudian peneliti memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.⁶⁹

Tahap uji kepercayaan ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan peneliti lakukan secara

⁶⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hlm 327.

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 124-125.

mendalam didukung dengan wawancara kembali kepada informan untuk memperoleh data yang terpercaya.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁷⁰Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

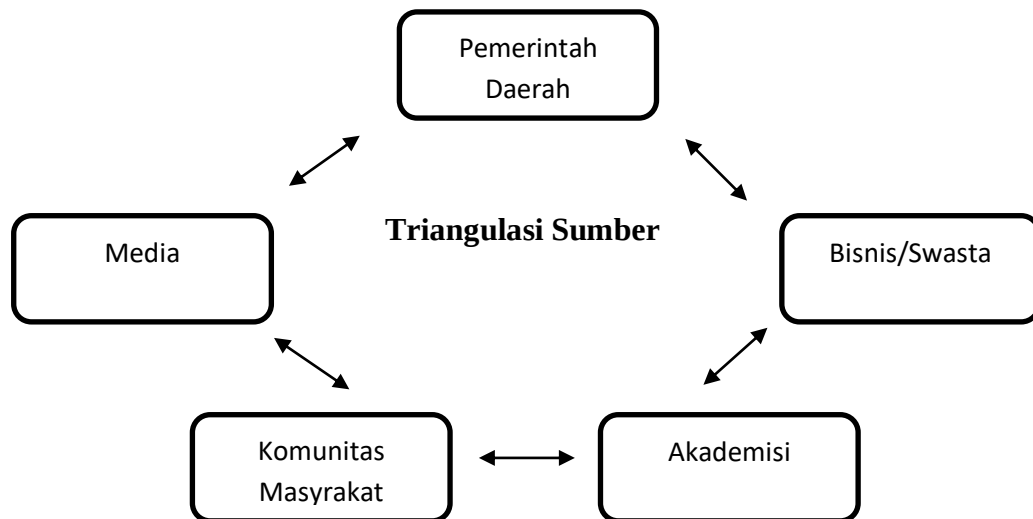
1. Triangulasi Sumber.

Triangulasi sumber digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷¹Data atau informasi digali dari lima sumber yakni Pemerintah Daerah, Bisnis/Swasta,Akademisi,Komunitas Masyarakat dan Media di Kota Tangerang Selatan.Untuk lebih jelas gambaran proses penelitian dalam triangulasi sumber dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid.*,hlm 372.

⁷¹ *Ibid.*,hlm 373.

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber



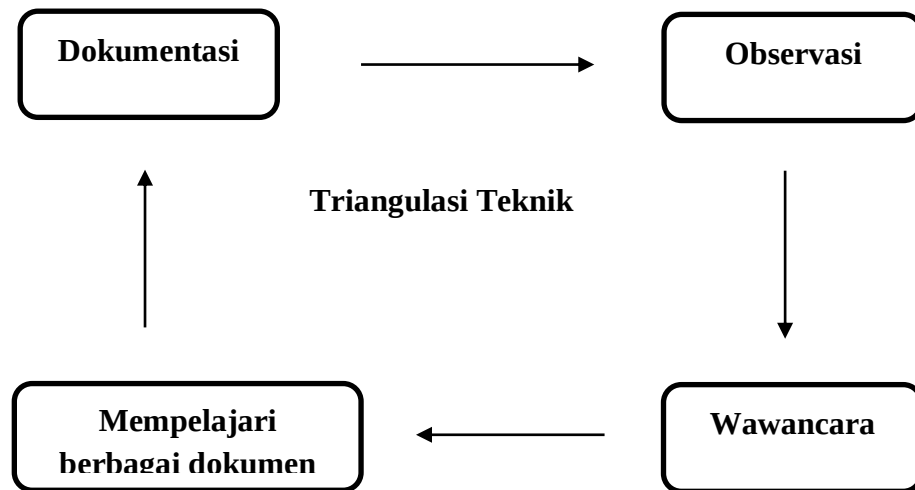
2. Triangulasi Teknik.

Triangulasi Teknik digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁷²

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan empat macam teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, mempelajari berbagai dokumen dan dokumentasi. Untuk lebih jelas gambaran proses penelitian dalam triangulasi teknik dapat dilihat pada gambar sebagai berikut

⁷² *Ibid.*, hlm 374.

Gambar 3.3 Triangulasi Teknik



3. Triangulasi Waktu.

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.⁷³ Triangulasi waktu digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan observasi, wawancara, atau teknik lain dalam waktu hari dan situasi kondisi yang berbeda-beda. Maka pengecekan biasa dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Tiga triangulasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mencocokkan data hasil temuan lapangan berupa data-data kegiatan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang di dapat melalui hasil observasi langsung, hasil wawancara Pemerintah Daerah, Bisnis/Swasta, Akademisi, Komunitas Masyarakat dan Media

⁷³ *Ibid.*, hlm 375.

yang ada di Kota Tangerang Selatan serta dokumentasi kegiatan berupa foto-foto kegiatan penelitian.

d. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁷⁴Peneliti mengadakan *member check* dengan cara melakukan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (informan). Hal tersebut akan peneliti lakukan dengan kunjungan ulang ke Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan untuk mengonfirmasi data-data yang peneliti laporkan apakah telah sesuai ataukah belum. Proses pengecekan dilakukan melalui diskusi dan wawancara pada informan dengan harapan informan bisa memahami temuan peneliti..

2) Uji *transferability* (validitas eksternal)

Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga manakah hasil penelitian itu dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi-situasi lain.⁷⁵Konsep ini merupakan pengganti dari validitas eksternal dalam penelitian kualitatif.

Bagi peneliti, *transferability* bergantung pada si pemakai, yakni sampai manakah hasil penelitian ini dapat digunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 376.

⁷⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, PT. Tarsito, Bandung, 2002, hlm 118.

Peneliti telah memberikan deskripsi yang terinci bagaimana peneliti mencapai hasil penelitian ini, apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan, diserahkan kepada para pembaca dan pemakai. Bila pembaca laporan penelitian mampu memperoleh gambaran yang sedemikian jelas dari hasil penelitian maka laporan ini memenuhi standar *transferabilitas*.

3) Uji *dependability* (reliabilitas).

Dependability menurut istilah konvensional disebut "*reliability*" atau realitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasikan proses penelitian tersebut. Dalam audit oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.⁷⁶

4) Uji *confirmability* (objektivitas).

Uji *confirmability* ini merupakan pengganti konsep objektivitas dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, objektivitas diukur melalui orangnya atau peneliti sendiri.⁷⁷ Bagi penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan R&D*, op.cit., hlm 377.

⁷⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Sacbani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka setia, Bandung, 2009, hlm 151.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan profil daerah penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Profil daerah penelitian akan menyajikan gambaran umum Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Hasil penelitian akan menyajikan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan mulai menjadi kota mandiri sejak tahun 2008. Pembentukan wilayah ini sebagai kota otonom berawal dari keinginan warga di kawasan Tangerang Selatan untuk menyejahterakan masyarakat. Warga merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang sehingga banyak fasilitas terabaikan.

Berdasarkan hal itu, bertahun-tahun dilakukan perundingan akhirnya dibuatlah sebuah Undang Undang pendirian Tangerang Selatan yaitu UU Nomor 51 Tahun 2008, tertanggal 26 November 2008. Undang Undang tersebut kemudian menjadi pelengkap dari sejarah Kota Tangerang Selatan. Pembentukan Kota Tangerang Selatan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, dengan 7 kecamatan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang pada 27 Desember 2006.

Selama terbentuknya, Kota Tangerang Selatan telah dipimpin oleh beberapa Kepala Pemerintah daerah yaitu Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dimulai dari tahun 2009 hingga saat ini. Dibawah ini akan dijelaskan sejarah kepemimpinan pemerintahan kota tangerang selatan.

Tabel 4.1

Sejarah Kepemimpinan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan

2009-2010	Mohammad Shaleh (Penjabat Sementara)
2010-2011	Eutik Suarta (Penjabat)
2011	Hidayat Djohari (Penjabat)
2011-2021	Airin Rachmi Diany (2 Periode)
2021	<u>Bambang Noertjahjo</u> (Pelaksana Harian)
2021-2024	<u>Benyamin Davnie</u> (Pejabat)

Sumber : <https://www.tangerangselatankota.go.id/>

4.1.2 Letak Geografis

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Secara administratif, wilayah Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan. Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, luas Kota Tangerang Selatan adalah 147,19 km² atau 14.719 hektar. Pada tahun 2017, Badan Informasi Geospasial (BIG) melakukan pengukuran delineasi atas peta rupa bumi, dihasilkan luas wilayah Kota Tangerang Selatan menjadi 16.485,47 hektar pada

koordinat 106° 38' - 106°47' bujur timur dan 06° 13'30'' - 06° 22'00'' lintang selatan dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Tangerang

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta

Sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Atas perubahan luasan tersebut, Kota Tangerang Selatan menetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031.

4.1.3 Kondisi Demografi Kota Tangerang Selatan

Gambaran umum demografis Kota Tangerang Selatan dapat digambarkan berdasarkan registrasi jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan sampai akhir Desember 2020 berjumlah 1.354.350 jiwa, dengan perincian pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2

Jumlah Pendudukan Kota Tangerang Selatan

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	678.159
2	Perempuan	676.161
	Total	1.354.350

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Dari tabel 4.2 di atas dapat menjelaskan bahwa jumlah penduduk kota Tangerang Selatan berdasarkan jenis kelamin yaitu jumlah penduduk yang jenis laki laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk yang jenis kelamin perempuan.

1. Komposisi Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri 2021 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk kota Tangerang Selatan menganut agama Islam yakni sebanyak 89,30%. Penduduk dari suku Sunda, Jawa, Betawi, Banten, Cirebon, Minangkabau, Melayu, Cirebon pada umumnya beragama Islam 83,35%, Pemeluk agama Kristen sebanyak 7,47%, dengan rincian Protestan sebanyak 4,40% dan Katolik 3,07%, yang umumnya dianut oleh suku Batak, Minahasa, Tionghoa, Nias, sebagian kecil Jawa, dan lainnya. Kemudian penduduk yang menganut agama Buddha sebanyak 0,96%, umumnya adalah orang Tionghoa, dan agama Hindu dianut sebanyak 0,30%, umumnya adalah orang Bali dan Konghucu dianut sebanyak 0,01%.⁷⁸

2. Komposisi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2020 Kota Tangerang Selatan memiliki 1.131 sekolah, 269.593 siswa dan 15.398 guru yang tersebar di berbagai kecamatan, meliputi jenjang TK, SD, SMP, dan SMA^[18]. Dengan rincian sebagai berikut;⁷⁹

⁷⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang_Selatan

⁷⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tangerang_Selatan

Kecamatan	Jumlah Sekolah Tahun 2023					Jumlah Siswa Tahun 2023				
	TK	SD	SMP	SMA	SMK	TK	SD	SMP	SMA	SMK
Setu	31	15	10	2	5	648	8.010	3.251	1.763	2.314
Serpong	62	59	41	27	13	2.318	20.820	9.706	5.615	3.095
Pamulang	103	71	42	15	15	3.494	25.940	10.783	4.474	7.635
Ciputat	87	55	37	15	16	2.912	23.426	8.435	7.081	8.445
Ciputat Timur	65	28	19	10	14	2.288	12.548	7.873	4.004	2.610
Pondok Aren	122	78	46	21	15	4.001	28.810	11.445	5.106	4.560
Serpong Utara	45	35	18	10	4	1.746	13.273	6.323	3.667	3.001

Kota Tangerang Selatan	51 5	34 1	213	100	82	17.87 2	132.8 27	57.81 6	31.71 0	31.66 0
------------------------------	---------	---------	-----	-----	----	------------	-------------	------------	------------	------------

4.1.4 Kondisi Ekonomi Kota Tangerang Selatan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp.5.256.882, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp.2.768.764. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2007 mencapai 1.042.682 orang, PDRB per-kapita adalah sebesar Rp.5.042.000.

Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun demikian juga dengan PDRB per-kapita. Pada tahun 2007, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah sebesar 6,51%. Pada tahun 2003, PDRB per-kapita atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp 863.517. Kecamatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah Kecamatan Ciputat Timur yaitu sebesar Rp 167 Trilyun atau 31,93% dari total PDRB. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Setu dengan Rp 71 Trilyun atau 1,35%.

Berdasarkan Data PDRB tahun 2007, struktur ekonomi Tangerang Selatan didominasi oleh sektor Usaha Pengangkutan dan Komunikasi (30,29%) serta Perdagangan Hotel dan Restoran (26,81%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan (15,40%).

Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang Selatan didominasi oleh sektor tersier, yaitu Pengangkutan dan Komunikasi,

Perdagangan Hotel dan Restoran serta Bank, Persewaan dan Jasa Perusahaan, yang memberikan kontribusi hampir 90%.

Sektor sekunder berupa Industri Pengolahan; Listrik, Gas, Air Bersih, dan Konstruksi memberikan kontribusi 8,76%, dan sektor primer seperti Pertanian, Pertambangan dan Penggalian hanya memberikan kontribusi kurang dari 2%. Jika dilihat kecenderungan sejak tahun 2004 hingga tahun 2007, sektor primer dan sekunder mengecil kontribusinya secara signifikan sedangkan sektor tersier meningkat kontribusinya.

4.1.5 Kondisi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan sebagai penyelenggaraan dan bertanggung jawab utama dalam bidang pemerintahan di daerah. Dalam pemerintahan yang dimaksud adalah melaksanakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, sekaligus pemelihara sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum. Susunan Organisasi pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terdiri dari :

4.2 Hasil Penelitian

Paparan data yang peneliti peroleh dari lapangan adalah data hasil observasi dan *interview* atau wawancara. Dalam hal ini, peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi. Wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara terstruktur atau bisa dikatakan wawancara formal dimana peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Hasil penelitian ini didapatkan dari wawancara mendalam dengan narasumber penelitian. Narasumber penelitian dalam penelitian ini terdiri dari Sekretaris Daerah, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan dan Masyarakat Kota Tangerang Selatan dimana informan tersebut merupakan sumber data utama yang peneliti anggap dapat memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DI KOTA TANGERANG SELATAN”**

Berikut ini adalah data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh peneliti.

4.2.1 Pemerintah Daerah

Bagaimana Implementas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban dari setiap informan :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan yaitu Bapak Bambang Noertjahjo SE, Ak 6 September 2023 pukul 10.00 WIB** dikantor Sekretaris Daerah mengatakan :

”Implementasi itu sama seperti pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. menurut saya selaku sekretaris daerah pemerintah daerah kota tangerang selatan tentunya dalam penerapannya pasti tidak 100% berjalan dengan baik pasti ada saja hambatan yang dilalui. apalagi perihal kemiskinan dan pengangguran tentunya pasti dimiliki oleh setiap daerah. namun saat ini untuk di tingkat provinsi banten kota tangerang selatan sendiri merupakan kota yang memiliki angka pengangguran dan kemiskinan paling sedikit di banding daerah lainnya dan bahkan nomor 4 untuk tingkat kemiskinan paling sedikit di indonesia”

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan yaitu Bapak H. Abdul Rasyid, S.Ag., M.A.P 31 Agustus 2023 pukul 8.00 WIB** dikantor Sekretaris Daerah mengatakan :

”Implementasi Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan sudah baik, Anggaran penanganan kemiskinan di Kota Tangerang Selatan dialokasikan ke beberapa sektor, yaitu Pendidikan, Kesehatan, perubahan, dan penguatan daya beli. Penanganan kemiskinan dilakukan melalui kebijakan jangka pendek dan jangka Panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah menyediakan anggaran berupa penguatan daya beli melalui program bantuan. Untuk jangka Panjang, pemerintah melakukan intervensi melalui sektor Pendidikan dengan menyediakan beasiswa bagi Masyarakat. Disisi kesehatan melalui BPJS maupun layanan kesehatan gratis melalui RSUD. menyediakan program Bedah Rumah. Untuk menangani masalah pengangguran, pemerintah menyediakan program di Dinas Tenaga Kerja. Perihal total anggaran, dapat ditanyakan ke OPD yang berkaitan dengan hal tersebut secara langsung.

Dalam hal ini, DPRD berfungsi sebagai Lembaga yang menyetujui dan mengawasi pelaksanaan program tsb.”

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Kepala dinas Sosial Kota Tangerang Selatan yaitu Bapak Apendi S.Sos 15 September 2023 pukul 13.00 WIB** dikantor dinas sosial beliau mengatakan :

”selama ini dinas sosial sudah menjalankan kebijakan dengan sebaik mungkin untuk membantu memenuhi kebutuhan dan penganduan masyarakat kota tangerang selatan.tentunya hal ini kami lakukan sesuai dengan perintah dari pak wali kota agar masyarakat kota tangerang selatan dapat merasa nyaman dengan berbagai macam upaya seperti memberikan bantuan usaha ekonomi produktif,penyaluran logistik bencana,bantuan langsung tunai, hibah dan masih banyak hal lainnya.”

- Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan lagi yaitu,apa **faktor pendukung dan penghambat Implementas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?**

Jawaban dari setiap informan :

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan yaitu Bapak Bambang Noertjahjo SE,Ak 6 September 2023 pukul 10.00 WIB** dikantor Sekretaris Daerah mengatakan :

”Faktor pendukung untuk kebijakan pemerintah daerah sendiri dalam menangani pengangguran dan kemiskinan tentunya sudah cukup tersalurkan dengan baik di masing masing kecamatan dengan memberikan bantuan bantuan,pelatihan dan juga berbagai macam kegiatan yang selama ini diselenggarakan seperti Subsidi beras miskin (Raskin), Sembako murah 6 kali dalam setahun, Pembangunan rumah layak huni (RLH) rata-rata 180

unit pertahun , Beasiswa keluarga miskin, Bantuan sosial peralatan sekolah keluarga miskin dan penyandang cacat, Bantuan rumah tangga miskin, lansia terlantar Rp, 200.000, perbulan Serta bantuan sosial kepada yatim piatu dan masih banyak lainnya. Dengan adanya bantuan program program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu memperbaiki angka pengangguran dan kemiskinan serta terbantunya perekonomian masyarakat. sejauh ini faktor penghambatnya sejauh ini perlu ditingkat kembali pengawasan yang dilakukan setiap kecamatan”

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan yaitu Bapak H. Abdul Rasyid, S.Ag., M.A.P 31 Agustus 2023 pukul 8.00 WIB** dikantor Sekretaris Daerah mengatakan :

”untuk faktor pendukung Kita Tangsel didukung oleh PAD yang cukup besar, dan hal tersebut membantu penanganannya. Selain itu, kesepahaman persepsi para pemangku kebijakan (pemkot dan DPRD) dalam melihat persoalan juga membantu hal tsb dan untuk dan untuk faktor penghambatnya sendiri berdasarkan data itu tidak ada, namun akurasi data masih perlu dilakukan DPRD agar intervensi/pengawasan tepat sasaran.”

6. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Kepala dinas Sosial Kota Tangerang Selatan yaitu Bapak Apendi S.Sos 15 September 2023 pukul 13.00 WIB** dikantor dinas sosial beliau mengatakan :

”kita dinas sosial sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penangan kemiskinan agar dapat berjalan dengan baik selain itu faktor penghambat selama ini banyak program yang masih kurang tepat sasaran akibat masyarakat yang kurang tau mengenai program program pemerintah yang dapat membantu perekonomian mereka.”

Dan terakhir peneliti memberikan pertanyaan berikutnya yaitu, apa **Upaya Implementas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?**

7. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan yaitu Bapak Bambang Noertjahjo SE, Ak 6 September 2023 pukul 10.00 WIB** dikantor Sekretaris Daerah mengatakan :

”upaya saat ini yang terus kami lakukan dengan pemerataan disetiap wilayah kecamatan di tangsel dan melakukan pengawasan agar masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan setiap program bantuan yang ada”

8. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan yaitu Bapak H. Abdul Rasyid, S.Ag., M.A.P 31 Agustus 2023 pukul 8.00 WIB** dikantor Sekretaris Daerah mengatakan :

”upaya yang dijalankan melalui Peraturan dan kebijakan sudah cukup konsisten. Namun memerlukan evaluasi mendalam tentang impek dari setiap kebijakan/program yang ada agar efektif dan tepat sasaran”

9. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Kepala dinas Sosial Kota Tangerang Selatan yaitu Bapak Apendi S.Sos 15 September 2023 pukul 13.00 WIB** dikantor dinas sosial beliau mengatakan :

”prioritas kami saat ini menargetkan untuk memberikan priotas kepada masyarakat kurang mampu atau membutuhkan bantuan dari pemerintah, tentu upaya yang kami lakukan dari dinas sosial selalu melakukan sosialisasi di setiap kelurahan yang ada di kota tangerang selatan dan melakukan kolaborasi melakukan program yang dapat membantu masyarakat”

4.2.2 Masyarakat

Bagaimana Implementas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban dari setiap informan :

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat I yaitu ibu Rosmianti pada tanggal 25 September 2023 pukul 10.00 WIB** dirumah beliau mengatakan :

”Penerepan kebijakan sejauh ini menurut saya sebagai masyarakat pasti ada yang bisa dijalankan ada juga yang tidak.tapi saya harap pemerintah lebih dapat memberikan solusi dalam memberikan bantuan terkhusus untuk masyarakat kurang mampu agar tepat sasaran dengan adanya komunikasi secara langsung di setiap wilayah karna memang saat ini komunikasi masih kurang”

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat II yaitu ibu Mulyana pada tanggal 25 September 2023 pukul 13.00 WIB** dirumah beliau mengatakan :

”menurut ibu sebagai warga bakti jaya Kecamatan setu pemerintah telah memberikan bantuan sebagaimana mestinya walaupun memang belum merata saja.baru baru ini warga bakti jaya mendapatkan bantuan renovasi rumah dari pak wali tentu dapat membuktikan bahwa pemerintah sudah melakukan kebijakan dengan baik”

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat III yaitu bapak Abenk pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.00 WIB** dirumah beliau mengatakan :

”yang saya rasakan sejauh ini dalam menangani masalah pengangguran,pemerintah hanya memberikan pelatihan pelatihan saja tanpa memberikan solusi untuk menerapkan ilmu pelatihan yang diberikan seperti bekerjasama dengan pihak swasta dalam membuka lowongan

pekerjaan,tentu bila saat ini banyaknya pengangguran dapat merembet ke perekonomian kelaurga apa lagi saat ini bahan baku makanan di tangsel relatif mahal dikarenakan cuaca”

4. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat IV yaitu bapak Suheri pada tanggal 28 September 2023 pukul 15.00 WIB** dirumah beliau mengatakan :

”Penerapan kebijakan terkait pengangguran dan kemiskinan saya merasakan bahwa pemerintah kota saat ini sudah memberikan upaya bantuan kepada masyarakat.di kelurahan babakan sendiri warganya di setiap RT mendapatkan bantuan yang di fokuskan kepada janda,keluarga kurang mampu dan tempat yatim piatu namun memang untuk mengatasi pengangguran sendiri kelurahan babakan baru memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat itupun 3-4 bulan sekali mas namun sayangnya sarana prasarananya masih kurang memadai masih banyak yang kurang seperti bangku meja dalam pelatihan serta peralatan dalam melakukan pelatihan jadi tidak maksimal”

Selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan lagi yaitu,apa **faktor pendukung dan penghambat Implementas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?**

Jawaban dari setiap informan :

5. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat I yaitu ibu Rosmianti pada tanggal 25 September 2023 pukul 10.00 WIB** dirumah beliau mengatakan :

”faktor pendukung pastinya kami masyrakat selalu mendukung kebijakan pemerintah,faktor penghambat seperti yang tadi saya bilang pola komukisanya,komunikasi yang sangat penting antara aparat pemerintahannya dan masyarakat.”

6. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat II yaitu ibu Mulyana pada tanggal 25 September 2023 pukul 13.00 WIB** di rumah beliau mengatakan :

”Yang saya tau faktor pendukungnya sendiri setiap bulan masyarakat disini sih dapet bantuan beras minyak sama uang tunai tapi kalo faktor penghambatnya masih kurang tepat sasaran orang-orang yang seharusnya dapet malah ga kebagian sama yang ga mesti dapet. perlu juga diadakan musrenbang ditingkat rt/rw agar memudahkan dalam melakukan pendataan selain itu banyak juga pengurangan bantuan yang diberikan”

7. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat III yaitu bapak Abenk pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.00 WIB** di rumah beliau mengatakan :

”Jika saya lihat faktor penghambatnya lebih ada dari pada faktor pendukungnya. faktor penghambatnya seperti hubungan antara pemerintah daerah yang kurang terjun langsung memantau program dalam penanganan kemiskinan ataupun pengangguran ini. selain itu SDM yang ada saat ini belum benar-benar serius dalam menjalankan program-program yang ada hanya mementingkan kepentingan sendiri padahal jika mereka pasti semuanya bisa terimplementasikan dengan baik”

8. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat IV yaitu bapak Suheri pada tanggal 28 September 2023 pukul 15.00 WIB** di rumah beliau mengatakan :

”Faktor pendukung saat ini yang tahu paling hanya bantuan dari ketua rt ataupun rw setempat tapi faktor penghambatnya sendiri yang saya rasakan dan lihat sarana-prasana yang ada memang masih minim, sdmnya di tingkat kelurahan masih perlu ditingkat lagi pelayanannya terkhusus untuk masyarakat yang kurang mampu. selain itu pelatihan perlu dijadikan program di setiap kelurahan agar anak muda mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya ataupun memiliki usaha sendiri”

Dan terakhir peneliti memberikan pertanyaan berikutnya yaitu, apa **Upaya Implementas Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?**

Jawaban dari setiap informan :

9. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat I yaitu ibu Rosmianti pada tanggal 25 September 2023 pukul 10.00 WIB** di rumah beliau mengatakan :

”Tentunya pasti sudah ada upaya yang dilakukan, namun memang belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat”

10. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat II yaitu ibu Mulyana pada tanggal 25 September 2023 pukul 13.00 WIB** di rumah beliau mengatakan :

”pemerintah sejauh ini sudah mengupayakan dengan baik ya, dengan melakukan bantuan setiap bulannya karena saya sendiri di kelurahan ikut ibu PKK jadi tau lah ya jika ada bantuan bantuan dari pemerintah. tapi memang belum tepat sasaran”

11. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat III yaitu bapak Abenk pada tanggal 26 September 2023 pukul 13.00 WIB** di rumah beliau mengatakan :

”pastilah ya pemerintah pasti sudah melakukan segala upaya, tapi memang upaya yang dilakukan belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, kalo boleh sih pengen ada di tangsel transportasi umum yang memang perlu di realisasikan karena memang tangsel sendiri transportasi umum masih sangat minim, sarana prasarana nya perlu ditingkatkan lagi”

12. Berdasarkan hasil wawancara dengan **Masyarakat IV yaitu bapak Suheri** pada tanggal 28 September 2023 pukul 15.00 WIB di rumah beliau mengatakan :

”Dari pemda mungkin memang selalu mengupayakan namun di tingkat kecamatan atau kelurahan kan belum tentu memiliki sdm yang sama.tentunya pasti saya selalu mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah selagi memang itu baik”

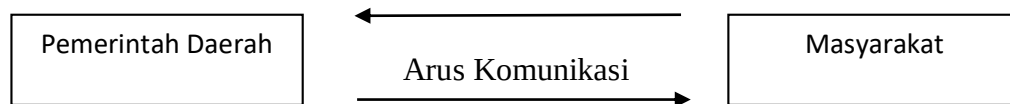
4.3 Pembahasan Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui observasi, wawancara, mempelajari berbagai dokumen dan dokumentasi. Selanjutnya dalam pembahasan akan dilakukan analisis hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan menggunakan Tori yang dikemukakan oleh C. Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur, Birokrasi.

4.3.1 Komunikasi

Komunikasi dalam konteks penelitian ini digunakan agar pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Di Kota Tangerang Selatan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi ini di dilakukan oleh Pemerintah daerah. Untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat maka dalam penyampaianannya harus benar dan tepat agar masyarakat dapat merasakan kebijakan yang telah diterapkan. Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi dan konsistensi.

Proses transmisi arus komunikasi dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari arus komunikasi diatas sama dengan proses transmisi atau penyaluran komunikasi. Transmisi yang terjadi baik jika dilihat dari pendeknya jalur birokrasi. Namun pada saat implementasinya tidak berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat.

Indikator selanjutnya dalah kejelasan komunikasi. Kejelasan merupakan hal yang penting karena dengan adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat, pelaksana dan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada tahap sosialisasi yang dilakukan baik dari Pemerintah daerah kepada Masyarakat belum berjalan dengan baik.

Indikator selanjutnya dalam komunikasi, yaitu konsisten. Konsistensi diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target *group* dan pihak-pihak yang berkepentingan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas,jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah,maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Apabila diperhatikan komunikasi yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di kota

tangerang selatan, masih belum cukup baik karena masih terdapat keluhan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah ataupun OPD lainnya.

4.3.2 Sumber Daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber anggaran/finansial untuk melaksanakan implementasi tersebut.

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dilihat dari hasil penelitian bahwa SDM OPD baik ditingkat kurang disiplin dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Masih terdapat kritikan dari Masyarakat Desa dimana OPD belum menjalankan tugas, pokok dan fungsinya baik dalam menjalankan program yang sudah diterapkan oleh pemda, menyalurkan aspirasi Masyarakat dan pengawasan terhadap program program pemerintah daerah.

2) Sumber Daya Anggaran

Dilihat dari hasil penelitian bahwa anggaran sudah cukup besar untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang terselenggaranya program Pemerintahan Daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Penanganan kemiskinan melalui kebijakan jangka pendek dan jangka Panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah menyediakan anggaran berupa penguatan daya beli melalui program bantuan. Untuk jangka Panjang, pemerintah melakukan intervensi melalui sektor Pendidikan dengan menyediakan beasiswa bagi Masyarakat pemerintah

menyediakan program Bedah Rumah. Untuk menangani masalah pengangguran, pemerintah menyediakan program di Dinas Tenaga Kerja.

Namun, anggaran untuk masyarakat kurang mampu tidak terealisasi sesuai secara sepenuhnya karena masih banyak kritikan dari masyarakat bahwa bantuan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dan masih kurang tepat sasaran bagi yang menerimanya. Artinya Masyarakat tidak mendapatkan seutuhnya bantuan dalam program pemerintah daerah. Jadi dapat disimpulkan, bahwa untuk anggaran masih belum seimbang antara Pemerintah daerah dan OPD dengan Masyarakat namun sudah cukup baik.

3) Sumber Daya Peralatan

Dilihat dari hasil penelitian bahwa Sumber Daya Peralatan yang di dapatkan oleh Pemerintah Daerah belum merata. Masih terdapat beberapa kursi dan meja serta alat pelatihan yang kurang memadai sehingga masyarakat belum dapat memaksimalkan pelatihan yang diberikan.

4.3.3 Disposisi(Sikap Pelaksana)

Disposisi atau Sikap pelaksana sangat penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi, karena tentu ini akan sangat mempengaruhi respon dari masyarakat. Dilihat dari hasil penelitian memang sikap dalam pelaksanaan program ini masih perlu ditingkatkan kembali terkhusus untuk para opd yang terlibat dalam menjalankan program pemerintah daerah. karena masih banyak masyarakat yang menyayangkan sikap petugas yang menjalankan program bantuan dari pemerintah kurang konsisten dan adil dalam menjalankan program bantuan tersebut.

4.3.4 Struktur Birokrasi

Dilihat dari hasil penelitian susunan struktur birokrasi yang terdapat pada pemerintah daerah sudah cukup jelas dalam pembagian tugas, pokok dan fungsi bahkan sampai di tingkat RT/RW. Apabila pemerintah daerah dan OPD dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan maka Implementasi Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan akan berjalan dengan sangat baik dan masyarakat akan lebih aktif dalam mendukung kebijakan dan kegiatan kegiatan pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik walaupun masih perlu ditingkat kembali pengawasan dan juga sosialisasi kepada masyarakat di kota tangerang selatan karena memang masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat karena masih terdapat kendala kendala yang dapat di tinjau oleh peneliti dengan menggunakan teori George C. Edward III, Sebagai Berikut :

- 1) Komunikasi. Komunikasi yang telah berjalan di dalam pemerintah daerah dan dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi, komunikasi di tingkat kecamatan sampai kelurahan perlu ditingkatkan kembali karena masyarakat masih belum dapat merasakan program yang diberikan secara merata dan tepat sasaran sehingga belum dapat dikatakan optimal dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
- 2) Sumber Daya. Sumber daya manusia, peralatan dan anggaran dalam melaksanakan kewajiban untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan sudah sangat baik walaupun masih perlu di tingkatkan kembali dari segi sumber daya manusia dan sarana prasana yang tersedia.

- 3) Disposisi/Sikap Pelaksana. Disposisi atau sikap pelaksana dapat dikatakan kurang baik untuk di tingkat kelurahan sehingga masyarakat masih banyak yang menyayangkan hal tersebut.
 - 4) Struktur Birokrasi. Pembagian tugas kepada OPD yang terlibat sudah sesuai dengan SOP yang berlaku namun pada pelaksanaannya dapat dikatakan kurang baik dikarenakan kewenangan yang telah dibagi menjadi satu kewenangan satu orang. Sehingga hal tersebut menjadi suatu konsep yang jauh dari kata efektif dan efisien.
2. Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :
1. Faktor Pendukung, berupa :
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
 - Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial T.E.U
 - Masyarakat
 2. Faktor Penghambat, berupa :
 - Sumber daya manusia yang belum merata kemampuan dan pengalaman sehingga belum berjalan dengan baik. Selain itu sumber daya peralatan yang belum sepenuhnya memadai padahal memiliki sumber daya anggaran yang cukup besar.

- Komunikasi yang belum cukup berjalan dengan baik antara pemerintah di tingkat kecamatan/kelurahan dengan masyarakat
 - Kurangnya sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai program program pemerintah yang dapat membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
3. Upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan sudah cukup maksimal terkhusus dengan program program yang ada saat ini Untuk jangka pendek, pemerintah menyediakan anggaran berupa penguatan daya beli melalui program bantuan. Untuk jangka Panjang, pemerintah melakukan intervensi melalui sektor Pendidikan dengan menyediakan beasiswa bagi Masyarakat, Subsidi beras miskin (Raskin), Sembako murah, Pembangunan rumah layak huni (RLH) rata-rata 180 unit pertahun, Beasiswa keluarga miskin, Bantuan sosial peralatan sekolah keluarga miskin dan penyandang cacat, Bantuan rumah tangga miskin, lansia terlantar Rp, 200.000, perbulan Serta bantuan sosial kepada yatim piatu dan masih banyak lainnya. Dengan adanya bantuan program program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu memperbaiki angka pengangguran dan kemiskinan serta terbantunya perekonomian masyarakat.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka penulis memberikan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Kepada Pemerintah Daerah dan OPD yang telibat lakukanlah kolaborasi dengan masyarakat setempat baik dari pihak swasta, akademisi, komunitas masyarakat

dan juga media agar program yang dijalankan dapat terlaksana secara maksimal demi kepentingan dan kepuasan masyarakat karena sudah seharusnya optimal dalam melayani masyarakat.

2. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik, maka harus didukung dengan dana, sarana prasarana serta kolaborasi yang baik dan memadai. Maka diharapkan pemerintah dapat terus memberikan bantuan dalam menyediakan sarana prasarana yang memang diperlukan oleh masyarakat di tangerang selatan salah satunya transportasi umum dan juga kolaborasi dengan pihak swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
3. Agar masyarakat mengerti dan mengetahui kemana tempat penyaluran aspirasi masyarakat, hendaknya pemerintah daerah melakukan sosialisasi gabungan ataupun membuat event mingguan seperti jalan sehat dan lainnya yang didalamnya dapat memberikan petunjuk kepada masyarakat terkait pelayanan pelayanan yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afifuddin dan Beni Ahmad Sacbani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :Pustaka setia
- Agostiono, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress.com>, diakses pada 15 september 2022.
- Bachrawi sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Dharma Setyawana Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*(Jakarta:Djambatan,2004),hlm 35.
- Edward III,George C,*Implementing Public Policy*.Washington DC:Congressional Quarterly Press,1980.
- Ermaya Suradinata,*Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*(Jakarta: PT.Vitcodata,2022).
- George C Edward III,*Implementing Public Policy*,Washington DC : Cpmgressional Quarterly Press,1980
- Ginandjar Kartasasmita, ,Jakarta:1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*,Jakarta.
- Harun, Rochajat dan Ardianto, Elvinaro. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014).
- Inu Kencana Syafiie,*Etika Pemerintahan*(Jakarta: PT.Rineka Cipta,2011).
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta: Erlangga.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Hadari Nawawi,*Metode Penelitian Bidang Sosial*,2001.
- Mazmanian,Daniel A and Paul A. Sabatier. *Implementation and Public Policy*,Scott Foresman and Company,USA,1983.
- Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno),*Teori dan Proses Kebijakan Publik*,Media Pressindo Yogyakarta,2002).

- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010.
- M. P dan Smith, S. C. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta: Erlangga, 2003).
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan, Sebuah Kajian Teori, Konsep, Dan Pengembangannya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2006).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Subandi, 2011. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm.52.
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernology 1* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 6
- Tatok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan*, Bandung; Alfabeta Bandung.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Veithzal rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.6
- Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*, PT Elex Media Komputindo Gramedia: Jakarta, hlm.52-59.

B. Perundang-Undangan

- Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015.
- Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, *Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. Jakarta : Kementrian Pariwisata.
- Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI tentang Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat (1)*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2018)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (2)
[,https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf),diakses pada
 Oktober 2, 2022

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Pasal 1,(Jakarta Selatan:PT Visimedia Pustaka,2016)

C. Jurnal

Akib,Haedar dan Antonius Tarigan.,*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan:Perspektif,Model dan Kriteria Pengukurannya*,Jurnal Baca,Volume 1 Agustus 2008,Universitas Pepabari Makassar,2008.

Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. 1995. *The Triple Helix. University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development*. *EASST Review*, 14(1), pp. 14-19, 1995.

Yawson R. M., 2009, The Ecological System of Innovation: A New Architectural Framework for a Functional Evidence-Based Platform for Science and Innovation Policy, The Future of Innovation Proceedings of the XXIV ISPIM 2009 Conference, https://www.researchgate.net/publication/228737411_The_Ecological_System_of_Innovation_A_New_Architectural_Framework_for_a_Functional_Evidence-Based_Platform_for_Science_and_Innovation_Policy,Di Akses Pada 5 Oktober 2022 Pukul 22,00 WIB.

D. Skripsi,Tesis,Tesis Dan Makalah

Sitti Hajra,2022, *Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah Dan Masyarakat Di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)*,
<http://repository.iainpare.ac.id/3460/1/17.2400.100.pdf> , diakses pada oktober 11 2022 pukul 03.10 WIB.

Supriadi,2017, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Khilan Di Kota Palopo*,
<https://core.ac.uk/download/pdf/89564485.pdf>, diakses pada oktober 11 2022 pukul 03.00 WIB.

Rahmi,2018, *peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat industri berbasis ekonomi kreatif di kabupaten bantaeng*,
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12664/1/Peran%20pemerintah%20daerah%20dalam%20pemberdayaan%20masyarakat%20industri%20berbasis%20ekonomi%20kreatif.pdf> , diakses pada oktober 11 2022 pukul 03.05 WIB.

Operasional

Konsep, <https://kinibisa.com/artikel/detail/research/subdetail/research-writing/read/operasionalisasi-konsep-penelitian>, diakses pada Oktober 7 2022 pukul 13.26 WIB.

E. Website

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Selatan, *Data Indikator Pembangunan Kota Tangerang Selatan*, 2021, <https://bappeda.tangerangselatankota.go.id/uploads/angka/11.pdf>, hlm 24 dan hal 47. Di akses pada Oktober 1 2022 pukul 23.00 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Presentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen*, Oktober 1 2022, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20Maret,juta%20orang%20terhadap%20Maret%202021>. Di akses pada Oktober 1 2022 pukul 19.37 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,83 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 2,89 juta rupiah perbulan*, Oktober 1 2022, [https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20\(TPT\)%20Februari,kerja%20yang%20terdampak%20COVID%2D19](https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html#:~:text=Tingkat%20Pengangguran%20Terbuka%20(TPT)%20Februari,kerja%20yang%20terdampak%20COVID%2D19). Di akses pada Oktober 1 2022 pukul 19.51 WIB.

Didahptr, *Macam-macam kesenjangan sosial*, oktober ;2015, <https://didahputri.wordpress.com/2015/10/28/macam-macam-kesenjangan-sosial/>, diakses pada tanggal 26 oktober 2022, pukul 23.46 WIB.

Kabar Tangsel.com, *Peta Kota Tangsel*, <https://kabartangsel.com/direktori-tangsel/peta-kota-tangerang-selatan>, diakses pada oktober 15 2022 pukul 3.16 WIB.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *MenKeu: Transfer ke daerah akan menembus Angka Rp. 800 Triliun Tahun 2023*, Oktober 1 2022, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Transfer-ke-Daerah-Rp800-triliun>, Di akses pada Oktober 1 2022 pukul 20.27 WIB.

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pendekatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan meliputi :

1. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pembangunan Masyarakat untuk Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan.

2. Aspek Yang Diamati

Beberapa Aspek yang diamati dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut :

- a) Lokasi Wilayah/Daerah
- b) Lingkungan fisik kantor Pemerintah, Pihak Swasta, Komunitas, Akademisi dan Media
- c) Unit kerja/Ruangan Pemerintah, Pihak Swasta, Komunitas, Akademisi dan Media
- d) Sarana dan prasarana pendukung kinerja dari masing-masing sektor Konsep Penta Helix
- e) Siapa saja yang berperan dalam pelayanan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Kota Tangerang Selatan

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Petunjuk

- a) Setiap informasi mendapatkan pertanyaan dari peneliti sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
- b) Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan peneliti tidak akan lepas dari pokok-pokok permasalahan yang diteliti.

2. Identitas Informan

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan :

3. Daftar Pertanyaan

Daftar pertanyaan digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di Kota Tangerang Selatan khususnya dalam mengatasi mengatasi pengangguran dan kemiskinan.berikut daftar pertanyaan yaitu :

1. Apakah Komunikasi antara pemerintah daerah dengan OPD berjalan dengan baik ?

2. Apakah peraturan daerah/kebijakan yang dibuat sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat kota tangerang selatan ?
3. Apakah dari peraturan/kebijakan yang dibuat sudah mencapai tingkat konsistensi yang diinginkan ?
4. Apakah sumber daya manusia yang ada pada OPD sudah mumpuni baik dari segi pengalaman, pendidikan dan softskill yang dimiliki ?
5. Apakah sumber anggaran yang dikeluarkan dalam menjalankan program sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?
6. Apakah sarana prasarana yang digunakan sudah cukup menunjang ?
7. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?
8. Apakah masyarakat dilibat dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan/kebijakan ?
9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?
10. Apakah pembagian tugas, pokok dan fungsi dari masing masing opd sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?
11. Upaya apa yang dilakuka pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?
12. Apakah yang menjadi harapan bapak/ibu kedepan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?

Lampiran III

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI

Pada Tanggal 31 Agustus 2023 peneliti datang ke kantor DPRD kota Tangerang Selatan dengan maksud ingin melakukan observasi awal dan memperkenalkan diri kepada Ketua DPRD kota Tangerang Selatan bahwa peneliti ingin melakukan sesi observasi awal dan beliau merespon dengan sangat baik.

Pada Tanggal 6 September 2023 melanjutkan observasi ke kantor Sekretaris Daerah kota tangerang selatan, disini peneliti banyak melihat perkembangan kota tangerang selatan dari tahun ketahun. selain itu juga peneliti melakukan observasi lanjutan guna melengkapi penelitian.

Berikutnya peneliti melakukan penelitian selama 1 bulan penuh dari bulan Agustus Akhir sampai September Akhir melakukan observasi dengan wawancara secara mendalam terhadap beberapa informan, diantaranya :

1. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
2. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
3. Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan
4. Masyarakat Kota Tangerang Selatan

Lampiran IV

CATATAN LAPORAN**HASIL WAWANCARA (GAMBARAN)**

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Nama | : Bambang Noertjahjo |
| Jenis Kelamin | : Laki Laki |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tangerang 9 April 1970 |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
| Jabatan | : Sekretaris Daerah |

Berikut ini Wawancara yang ditujukan kepada informan bapak **Sekretaris**

Daerah Kota Tangerang Selatan,yaitu :

1. Apakah Komunikasi antara pemerintah daerah dengan OPD berjalan dengan baik ?

Jawaban : Selama ini komunikasi berjalant baik baik saja

2. Apakah peraturan daerah/kebijkan yang dibuat sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat kota tangerang selatan ?

Jawaban : Kami selalu memberitahu ke setiap OPD baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan bahkan sampai RT/RW agar selalu memberikan informasi terbaru seputar kebijakan terbaru yang ada di kota tangerang selatan

3. Apakah dari peraturan/kebijakan yang dibuat sudah mencapai tingkat konsistensi yang diinginkan ?

Jawaban : Untuk tingkat konsistennya hampir mendekati

4. Apakah sumber daya manusia yang ada pada OPD sudah mumpuni baik dari segi pengalaman, pendidikan dan softskill yang dimiliki ?

Jawaban : Sejauh ini sudah cukup baik, namun belum merata

5. Apakah sumber anggaran yang dikeluarkan dalam menjalankan program sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

Jawaban : Sumber anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk program pemerintah daerah sudah sangat cukup dan besar

6. Apakah sarana prasarana yang digunakan sudah cukup menunjang ?

Jawaban : sudah cukup menunjang namun memang perlu ditingkatkan

7. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : Implementasi itu sama seperti pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. menurut saya selaku sekretaris daerah pemerintah daerah kota tangerang selatan tentunya dalam penerapannya pasti tidak 100% berjalan dengan baik pasti ada saja hambatan yang dilalui. apalagi perihal kemiskinan dan pengangguran tentunya pasti dimiliki oleh setiap daerah. namun saat ini untuk di tingkat provinsi banten kota tangerang selatan sendiri merupakan kota yang memiliki angka pengangguran dan kemiskinan paling sedikit di banding daerah lainnya dan bahkan nomor 4 untuk tingkat kemiskinan paling sedikit di indonesia.

8. Apakah masyarakat dilibat dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan/kebijakan ?

Jawaban : selama ini masyarakat selalu dilibat dalam membuat rancangan undang undang salah satunya melalui musrenbang

9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : Faktor pendukung untuk kebijakan pemerintah daerah sendiri dalam menangani pengangguran dan kemiskinan tentunya sudah cukup tersalurkan dengan baik di masing masing kecamatan dengan memberikan bantuan bantuan, pelatihan dan juga berbagai macam kegiatan yang selama ini diselenggarakan seperti Subsidi beras miskin (Raskin), Sembako murah 6 kali dalam setahun, Pembangunan rumah layak huni (RLH) rata-rata 180 unit pertahun , Beasiswa keluarga miskin, Bantuan sosial peralatan sekolah keluarga miskin dan penyandang cacat, Bantuan rumah tangga miskin, lansia terlantar Rp, 200.000, perbulan Serta bantuan sosial kepada yatim piatu dan masih banyak lainnya. Dengan adanya bantuan program program penanggulangan kemiskinan diharapkan mampu memperbaiki angka pengangguran dan kemiskinan serta terbantunya perekonomian masyarakat. .sejauh ini faktor penghambatnya sejauh ini perlu ditingkat kembali pengawasan yang dilakukan setiap kecamatan.

10. Apakah pembagian tugas, pokok dan fungsi dari masing masing opd sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Jawaban : Pembagian tugas dari masing masing instansi pemerintah harus sesuai dengan SOP yang berlaku

11. Upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?

Jawaban : upaya saat ini yang terus kami lakukan dengan pemerataan disetiap wilayah kecamatan di tangsel dan melakukan pengawasan agar masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan setiap program bantuan yang ada

12. Apakah yang harapan bapak/ibu kedepan dalam implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?

Jawaban : tentunya program program yang diberikan dapat tersampai secara menyeluruh di masyarakat

2. Nama : H Abdul Rasyid S

Jenis Kelamin : Laki Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 5 Juni 1974

Pendidikan Terakhir : S2

Jabatan : Ketua DPRD

Berikut ini Wawancara yang ditujukan kepada informan bapak **Ketua DPRD**

Kota Tangerang Selatan,yaitu :

1. Apakah Komunikasi antara pemerintah daerah dengan OPD berjalan dengan baik ?

Tentu harus baik

2. Apakah peraturan daerah/kebijakan yang dibuat sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat kota tangerang selatan ?

Jawaban : seharusnya sudah tersampaikan,namun hal ini bersifat variatif

3. Apakah dari peraturan/kebijakan yang dibuat sudah mencapai tingkat konsistensi yang diinginkan ?

Jawaban :Peraturan dan kebijakan sudah cukup konsisten,namun memerlukan evaluasi mendalam tentang impak dari kebijakan/program yang ada

4. Apakah sumber daya manusia yang ada pada OPD sudah mumpuni baik dari segi pengalaman,pendidikan dan softskill yang dimiliki ?

Jawaban : dari segi pengaman,pendidikan,atau softskill cukup baik

5. Apakah sumber anggaran yang dikeluarkan dalam menjalankan program sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

Jawaban : kita tangsel didukung oleh PAD yang cukup besar,tentu hal ini sangat membantu dalam penanganannya.

6. Apakah sarana prasarana yang digunakan sudah cukup menunjang ?

Jawaban : Sejauh ini sudah cukup menunjang dan tergantung bagaimana tiap instansi memanfaatkannya

7. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : Implementasi Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan sudah baik, Anggaran penanganan kemiskinan di Kota Tangerang Selatan dialokasikan ke beberapa sektor, yaitu Pendidikan, Kesehatan, perubahan, dan penguatan daya beli. Penanganan kemiskinan

melalui kebijakan jangka pendek dan jangka Panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah menyediakan anggaran berupa penguatan daya beli melalui program bantuan. Untuk jangka Panjang, pemerintah melakukan intervensi melalui sektor Pendidikan dengan menyediakan beasiswa bagi Masyarakat. Disini kesehatan melalui bpjs maupun layanan kesehatan gratis melalui RSUD.menyediakan program Bedah Rumah. Untuk menangani masalah pengangguran,pemerintah menyediakan program di Dinas Tenaga Kerja. Perihal total anggaran, dapat ditanyakan ke OPD yang berkaitan dengan hal tersebut secara langsung. Dalam hal ini, DPRD berfungsi sebagai Lembaga yang menyetujui dan mengawasi pelaksanaan program tsb.

8. Apakah masyarakat dilibat dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan/kebijakan ?

Jawaban : pastinya selalu dilibatkan ketika ada musrenbang

9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : untuk faktor pendukung Kita Tangsel didukung oleh PAD yang cukup besar, dan hal tersebut membantu penanganannya. Selain itu, kesepahaman persepsi para pemangku kebijakan (pemkot dan DPRD) dalam melihat persoalan juga membantu hal tsb dan untuk dan untuk faktor penghambatnya sendiri berdasarkan data itu tidak ada,namun akurasi data masih perlu dilakukan DPRD agar intervensi/pengawasan tepat sasaran.

10. Apakah pembagian tugas,pokok dan fungsi dari masing masing opd sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Jawaban :berdasarkan data sejauh ini sesuai dengan SOP berlaku,namun masih ada saja yang memang oknum oknum yang melakukan tindakan yang diluar ketentuan

11. Upaya apa yang dilakuka pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?

Jawaban : upaya yang dijalankan melalui Peraturan dan kebijakan sudah cukup konsisten. Namun memerlukan evaluasi mendalam tentang impek dari setiap kebijakan/program yang ada agar efektif dan tepat sasaran.

3. Nama : Apendi

Jenis Kelamin : Laki Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang 9 Agustus 1972

Pendidikan Terakhir : S1

Jabatan : Kepala Dinas Sosial

Berikut ini Wawancara yang ditujukan kepada informan bapak **Kepala Dinas**

Sosial Kota Tangerang Selatan,yaitu :

1. Apakah Komunikasi antara pemerintah daerah dengan OPD berjalan dengan baik ?

Jawaban : komunikasi berjalan dengan baik

2. Apakah peraturan daerah/kebijkan yang dibuat sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat kota tangerang selatan ?

Jawaban : sudah cukup baik dan merata

3. Apakah dari peraturan/kebijakan yang dibuat sudah mencapai tingkat konsistensi yang diinginkan ?

Jawaban : secara keseluruhan belum namun,kami di dinas sosial selalu berupaya untuk memberikan konsistensi dalam menjalankan peraturan.

4. Apakah sumber daya manusia yang ada pada OPD sudah mumpuni baik dari segi pengalaman,pendidikan dan softskill yang dimiliki ?

Jawaban : sudah sangat baik

5. Apakah sumber anggaran yang dikeluarkan dalam menjalankan program sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

Jawaban : saat ini cukup dikarenakan kota tangsel sendiri mengalami penurunan dalam angka kemiskinan

6. Apakah sarana prasarana yang digunakan sudah cukup menunjang ?

Jawaban : sarana prasarana yang ada belum cukup menunjang bagi masyarakat di setiap kelurahan

7. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : selama ini dinas sosial sudah menjalankan kebijakan dengan sebaik mungkin untuk membantu memenuhi kebutuhan dan penganduan masyarakat kota tangerang selatan.tentunya hal ini kami lakukan sesuai dengan perintah dari pak wali kota agar masyarakat kota tangerang selatan dapat merasa nyaman dengan berbagai macam upaya seperti memberikan bantuan usaha ekonomi

produktif, penyaluran logistik bencana, bantuan langsung tunai, hibah dan masih banyak hal lainnya.

8. Apakah masyarakat dilibat dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan/kebijakan ?

Jawaban : dalam penerapan tentunya dinsos selalu melibatkan masyarakat

9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : kita dinas sosial sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam penanganan kemiskinan agar dapat berjalan dengan baik selain itu faktor penghambat selama ini banyak program yang masih kurang tepat sasaran akibat masyarakat yang kurang tau mengenai program program pemerintah yang dapat membantu perekonomian mereka.

10. Apakah pembagian tugas, pokok dan fungsi dari masing masing opd sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Jawaban : Pembagian tugas sejauh ini perlu ditingkatkan karena masih ada yang mengalami kesulitan dalam melakukan pendataan

11. Upaya apa yang dilakuka pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?

Jawaban : prioritas kami saat ini menargetkan untuk memberikan priotas kepada masyarakat kurang mampu atau membutuhkan bantuan dari pemerintah, tentu upaya yang kami lakukan dari dinas sosial selalu melakukan sosialisasi di setiap

kelurahan yang ada di kota tangerang selatan dan melakukan kolaborasi melakukan program yang dapat membantu masyarakat

4. Nama : Rosmianti
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang 23 Oktober 1980
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Jabatan : Masyarakat

Berikut ini Wawancara yang ditujukan kepada informan **Masyarakat I** Kota Tangerang Selatan,yaitu :

1. Apakah Komunikasi antara pemerintah daerah dengan OPD berjalan dengan baik ?

Jawaban : yang saya lihat cukup baik komunikasi yang berjalan

2. Apakah peraturan daerah/kebijakan yang dibuat sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat kota tangerang selatan ?

Jawaban : saya masih belum mengetahui untuk ini

3. Apakah dari peraturan/kebijakan yang dibuat sudah mencapai tingkat konsistensi yang diinginkan ?

4. Apakah sumber daya manusia yang ada pada OPD sudah mumpuni baik dari segi pengalaman,pendidikan dan softskill yang dimiliki ?

Jawaban : belum cukup memumpuni dari segi pengalamannya

5. Apakah sumber anggaran yang dikeluarkan dalam menjalankan program sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

Jawaban : saya belum mengetahui untuk anggarannya

6. Apakah sarana prasarana yang digunakan sudah cukup menunjang ?

Jawaban : kemarin saat pelatihan di kelurahan masih banyak peralatan yang kurang padahal minat ibu ibu banyak yang mau ikut pelatihan

7. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : Penerepan kebijakan sejauh ini menurut saya sebagai masyarakat pasti ada yang bisa dijalankan ada juga yang tidak.tapi saya harap pemerintah lebih dapat memberikan solusi dalam memberikan bantuan terkhusus untuk masyarakat kurang mampu agar tepat sasaran dengan adanya komunikasi secara langsung di setiap wilayah karna memang saat ini komunikasi masih kurang

8. Apakah masyarakat dilibat dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan/kebijakan ?

Jawaban :

9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : faktor pendukung pastinya kami masyarakat selalu mendukung kebijakan pemerintah,faktor penghambat seperti yang tadi saya bilang pola komukisanya,komunikasi yang sangat penting antara aparat pemerintahannya dan masyarakat.”

10. Apakah pembagian tugas,pokok dan fungsi dari masing masing opd sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Jawaban : saya tidak tahu

11. Upaya apa yang dilakuka pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?

Jawabam : Tentunya pasti sudah ada upaya yang dilakukan,namun memang belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat”

5. Nama : Mulyana sintia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang 15 Agustus 1990
 Pendidikan Terakhir : S1
 Jabatan : Masyarakat

Berikut ini Wawancara yang ditujukan kepada informan **Masyarakat II** Kota Tangerang Selatan,yaitu :

1. Apakah Komunikasi antara pemerintah daerah dengan OPD berjalan dengan baik ? komunikasi yang saya rasakan hanya lewat rt rw saja
2. Apakah peraturan daerah/kebijkan yang dibuat sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat kota tangerang selatan ?

Jawaban : untuk ini saya kurang mengetahui

3. Apakah dari peraturan/kebijakan yang dibuat sudah mencapai tingkat konsistensi yang diinginkan ?

Jawaban : peraturan yang diberikan sudah cukup konsisten tapi kalo bisa ditingkatkan lagi

4. Apakah sumber daya manusia yang ada pada OPD sudah mumpuni baik dari segi pengalaman, pendidikan dan softskill yang dimiliki ?

Jawaban : mungkin sudah ya mas

5. Apakah sumber anggaran yang dikeluarkan dalam menjalankan program sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?

Jawaban : untuk anggaran sendiri yang kurang mengetahui tapi bantuan yang diberikan sangat membantu masyarakat

6. Apakah sarana prasarana yang digunakan sudah cukup menunjang ?

Jawabam :

7. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : menurut ibu sebagai warga bakti jaya Kecamatan setu pemerintah telah memberikan bantuan sebagaimana mestinya walaupun memang belum merata saja. baru baru ini warga bakti jaya mendapatkan bantuan renovasi rumah dari pak wali tentu dapat membuktikan bahwa pemerintah sudah melakukan kebijakan dengan baik

8. Apakah masyarakat dilibat dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan/kebijakan ?

Jawaban :

9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : Yang saya tau faktor pendukungnya sendiri setiap bulan masyarakat disini sih dapet bantuan beras minyak sama uang tunai tapi kalo faktor penghambatnya masih kurang tepat sasaran orang orang yang seharusnya dapet malah ga kebagian sama yang ga mesti dapet.perlu juga diadakan nya musrenbang ditingkat rt/rw agar memudahkan dalam melakukan pendataan selain itu banyak nya pengurangan bantuan yang diberikan

10. Apakah pembagian tugas,pokok dan fungsi dari masing masing opd sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Jawaban : saya kurang tahu koal soal ini namun jika dilihat sepertinya sudah

11. Upaya apa yang dilakuka pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?

Jawaban : pemerintah sejauh ini sudah mengupayakan dengan baik ya,dengan melakukan bantuan setiap bulannya karna saya sendiri di kelurahan ikut ibu pkk jadi tau lah ya jika ada bantuan bantuan dari pemerintah.tapi emang belum tepat sasaran

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 6. Nama | : Abenk |
| Jenis Kelamin | : Laki Laki |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Tangerang 2 Juni 1983 |
| Pendidikan Terakhir | : SMA |
| Jabatan | : Masyarakat |

Berikut ini Wawancara yang ditujukan kepada informan **Masyaraakt III**

Kota Tangerang Selatan,yaitu :

1. Apakah Komunikasi antara pemerintah daerah dengan OPD berjalan dengan baik ? sudah namun belum merata
2. Apakah peraturan daerah/kebijakan yang dibuat sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat kota tangerang selatan ? belum tersampaikan secara menyeluruh
3. Apakah dari peraturan/kebijakan yang dibuat sudah mencapai tingkat konsistensi yang diinginkan ? belum konsisten dalam melakukan program karena masih banyak kebutuhan yang tidak sesuai
4. Apakah sumber daya manusia yang ada pada OPD sudah mumpuni baik dari segi pengalaman, pendidikan dan softskill yang dimiliki ? belum cukup baik terkhusus di tingkat kelurahan
5. Apakah sumber anggaran yang dikeluarkan dalam menjalankan program sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ? anggaran yang besar namun belum tepat sasaran
6. Apakah sarana prasarana yang digunakan sudah cukup menunjang ?
Jawaban : Sarana prasarana saat ini sudah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi
7. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : yang saya rasakan sejauh ini dalam menangani masalah pengangguran, pemerintah hanya memberikan pelatihan pelatihan saja tanpa memberikan solusi untuk menerapkan ilmu pelatihan yang diberikan seperti bekerjasama dengan pihak swasta dalam membuka lowongan pekerjaan, tentu

bila saat ini banyaknya pengangguran dapat merembet ke perekonomian keluarga apa lagi saat ini bahan baku makanan di tangsel relatif mahal dikarenakan cuaca

8. Apakah masyarakat dilibat dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan/kebijakan ?

Jawaban :

9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : Jika saya lihat faktor penghambatnya lebih ada dari pada faktor pendukungnya.faktor penghambatnya seperti hubungan antara pemerintah daerah yang kurang terjun langsung memantau program dalam penanganan kemiskinan ataupun pengangguran ini.selain itu SDM yang ada saat ini belum benar benar serius dalam menjalankan program program yang ada hanya mementingkan kepentingan sendiri padahal jika mereka pasti semuanya bisa terimplementasikan dengan baik

10. Apakah pembagian tugas,pokok dan fungsi dari masing masing opd sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Jawaban : belum cukup baik

11. Upaya apa yang dilakuka pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?

Jawaban : pastilah ya pemerintah pasti sudah melakukan segala upaya,tapi memang upaya yang dilakukan belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh

masyarakat,kalo boleh sih pengen ada di tangsel transpotasi umum yang memang perlu di realisasikan karna memang tangsel sendiri transportasi umum masih sangat minim,sarana prasarana nya perlu ditingkatkan lagi

7. Nama : Suheri
- Jenis Kelamin : Laki Laki
- Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang 10 Januari 1990
- Pendidikan Terakhir : SMA
- Jabatan : Masyarakat

Berikut ini Wawancara yang ditujukan kepada informan **Masyarakat IV**

Kota Tangerang Selatan,yaitu :

1. Apakah Komunikasi antara pemerintah daerah dengan OPD berjalan dengan baik ?

Jawaban : baik namun belum terjun secara langsung masih melalui karang taruna atau RT/RW

2. Apakah peraturan daerah/kebijakan yang dibuat sudah disampaikan kepada seluruh masyarakat kota tangerang selatan ?

Jawaban : Sejauh ini saya masih belum tau kebijakan dan program apa saja yang ada

3. Apakah dari peraturan/kebijakan yang dibuat sudah mencapai tingkat konsistensi yang diinginkan ?

Jawaban :

4. Apakah sumber daya manusia yang ada pada OPD sudah mumpuni baik dari segi pengalaman, pendidikan dan softskill yang dimiliki ?
5. Apakah sumber anggaran yang dikeluarkan dalam menjalankan program sudah sesuai dengan apa yang diharapkan ?
6. Apakah sarana prasarana yang digunakan sudah cukup menunjang ?
7. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : Penerapan kebijakan terkait pengangguran dan kemiskinan saya merasakan bahwa pemerintah kota saat ini sudah memberikan upaya bantuan kepada masyarakat. di kelurahan babakan sendiri warganya di setiap RT mendapatkan bantuan yang di fokuskan kepada janda, keluarga kurang mampu dan tempat yatim piatu namun memang untuk mengatasi pengangguran sendiri kelurahan babakan baru memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat itupun 3-4 bulan sekali mas namun sayangnya sarana prasarananya masih kurang memadai masih banyak yang kurang seperti bangku meja dalam pelatihan serta peralatan dalam melakukan pelatihan jadi tidak maksimal

8. Apakah masyarakat dilibat dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan/kebijakan ?

Jawaban : terlibat namun hanya diwakilkan

9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan di kota tangerang selatan ?

Jawaban : Faktor pendukung saat ini yang tahu paling hanya bantuan dari ketua rt ataupun rw setempat tapi faktor penghambatnya sendiri yang saya rasakan dan lihat sarana prasana yang ada memang masih minim, sdmnya di tingkat kelurahan masih perlu ditingkat lagi pelayanannya terkhusus untuk masyarakat yang kurang mampu. selain itu pelatihan perlu dijadikan program disetiap kelurahan agar anak muda mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya ataupun memiliki usaha sendiri

10. Apakah pembagian tugas, pokok dan fungsi dari masing masing opd sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

Jawaban : belum begitu baik

11. Upaya apa yang dilakuka pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan ?

Jawabam : Dari pemda mungkin memang selalu mengupayakan namun di tingkat kecamatan atau kelurahan kan belum tentu memiliki sdm yang sama. tentunya pasti saya selalu mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah selagi memang itu baik

Lampiran V

DOKUMEN PENDUKUNG**(FOTO DAN DOKUMEN)**

Keterangan : Wawancara Bersama Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan



Keterangan : Wawancara Bersama Warga Kota Tangerang Selatan



Keterangan : Wawancara Bersama Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang

Selatan



Keterangan : Wawancara Bersama Lurah Kelurahan Bakti Jaya Kec. Setu



Keterangan : Wawancara Bersama Warga Kota Tangerang Selatan



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Raya Serpong BSD City Ruko Mall WTC Matahari No.5879/5881 Kota Tangerang Selatan
Kelurahan Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara 15326. ✉ kesbangpol@tangselsel.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 200.1.3.3/349 /Kesbangpol/2023

- MEMBACA** : Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Nomor : 791/STIP-AN-A/VII/2023 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor. 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan.
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- NAMA** : TEGGAR ANUGRAH RAMADHAN
NPM/NIM/NIP/NIK : 192041950
INSTANSI : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara
JUDUL PENELITIAN : "Implementasi Model Penta Helix Dalam Mengambil Kebijakan Pemerintah Daerah Untuk Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan"
LOKASI PENELITIAN : DPRD, BAPPEDA dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan
LAMA PENELITIAN : Agustus 2023
MAKSUD DAN TUJUAN : Permohonan Izin Penelitian.

berdasarkan pertimbangan kelengkapan penelitian, dengan ini memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di lokasi yang dituju dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian pada organisasi perangkat daerah terkait, yang bersangkutan wajib melaporkan kedatangannya kepada kepala organisasi perangkat daerah dengan menunjukkan surat keterangan penelitian dari Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma atau adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku surat sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai maka perpanjangan penelitian harus diajukan kembali dari instansi pemohon.
5. Peneliti wajib menyerahkan laporan hasil penelitian 1 (satu) eksemplar kepada Badan Kesbangpol Kota Tangerang Selatan dan atau melalui email kesbangpoltangselsel@gmail.com.
6. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Serpong Utara
Pada tanggal : 01 Agustus 2023

KEPALA




**SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN
ABDI NEGARA**

Pendidikan Pemerintahan: SK 004/PT No. 127/2003-PT-14/2011-1/10-2013, Terakreditasi Peringkat "B"
 Pendidikan Politik: SK 004/PT No. 2017/200-004/PT-1/2017-1/10-2019, Terakreditasi Peringkat "B"
 Alamat: Jl. Caring Ngung No. 37 A, Jember, Jawa Timur 60132 Telp: (031) 788 7000, 788 800 10, 788 800 20
 Website: www.stip-an.ac.id E-mail: stip@stip-an.ac.id

Nomor : 823/STIP-AN-A/VIII/2023
 Lampiran : 2
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jakarta 22, Agustus 2023

Kepada Yth.
 Kepala Bappeda
 Kota Tangerang Selatan
 Dengan Hormat
 Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan STIP-AN dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Teggah Anugrah Ramadhan
 Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 4 Desember 2001
 NIM/KTM : 192041950
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan (S1)
 Alamat : Jln Bakti Jaya Posis 13 Rt 03/02 Kel. Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan,
 Provinsi Banten.
 No Tlpn : 082114584473/082310073024

Melalui surat ini kami nyatakan bahwa adalah benar nama diatas Mahasiswa Sekolah Tinggi
 Ilmu Pemerintahan Abdi Negara(STIP-AN) dengan tercatat masih aktif sebagai mahasiswa
 jurusan Ilmu Pemerintahan(S1).

Adapun kami memberikan lampiran sebagai pendukung penelitian mahasiswa yaitu :

- Transkrip Nilai Mahasiswa
- Kartu Tanda Mahasiswa

Kami mohon sudi kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa kami
 tersebut berupa surat penelitan di Lokasi yang di teliti.Dengan demikian Surat Keterangan ini
 diberikan dengan sebenar-benarnya sebagai syarat penelitian penulisan skripsi sebagai tugas akhir
 perkuliahan.atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Wakil Ketua STIP-AN

 Dr. Sofyan Safari Hamim, M.Si

RIWAYAT HIDUP



Teggar Anugrah Ramadhan, lahir di Bogor pada tanggal 4 Desember 2001, merupakan putra pertama dan satu satunya dari 3 bersaudara pasangan bapak darmo bandoro dan ibu iis nayanti yang sejak kecil tinggal dan dibesarkan di kota tangerang selatan provinsi banten.

Peneliti memulai pendidikan di TK darul Khoir dan melanjutkan Sekolah Dasar di SDN Rawakalong 02 Kab.Bogor.berikutnya peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 20 Tangerang Selatan dan tamat pada tahun 2016 kemudian melanjutkan di Pesantren Al – Hamidiyah Depok jurusan IPS dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara(STIP-AN). Selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara peneliti aktif dalam perkuliahan dan organisasi baik adlam maupun luar kampus seperti paskibra,Resimen Mahasiswa(MENWA),Nusantara Run,KORSIK,dan Wahana Bina Praja(WBP). Di Wahana Bina Praaja (WBP) peneliti pernah menduduki jabatan Kepala Desa,Sekretaris Camat,Kepala HUMAS dan terakhir Bupati Wahana Bina Praja(WBP).

Selain itu penulis mengikut beberapa kegiatan yang ada seperti DIKLATSUH,KANG NONG KOTA TANGERANG,KAMPUS MERDEKA,MAGANG DI INSTANSI PEMERINTAH.